

BAB 3

NASKAH MANIFES KEBUDAYAAN: SEBUAH PERNYATAAN CITA-CITA KEBUDAYAAN PARA SENIMAN DAN SASTRAWAN INDONESIA SEBAGAI REAKSI ATAS LEKRA

Manifes Kebudayaan bukanlah sebuah organisasi. Manifes Kebudayaan merupakan sebuah pernyataan kebudayaan dari seniman dan sastrawan yang menyatakan cita-cita kebudayaan mereka. Seperti yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, Manifes Kebudayaan bukanlah suatu pernyataan yang lahir tanpa proses. Lahirnya Manifes Kebudayaan melewati proses yang cukup panjang.

Sebelum menjadi sebuah naskah Manifes Kebudayaan yang disahkan oleh para manifestan dan disebarluaskan di berbagai media, penciptaan naskah Manifes Kebudayaan ini melalui proses pematangan isi naskah terlebih dahulu. Naskah ini pertama kali ditulis rancangannya oleh Wiratmo Soekito. Setelah menjadi sebuah naskah, naskah ini kemudian diperbincangkan di forum oleh para pendukung Manifes Kebudayaan. Para pendukung Manifes Kebudayaan menyebut dirinya sebagai manifestan. Kemudian, para manifestan memperbaiki naskah tersebut dan akhirnya lahirlah naskah Manifes Kebudayaan yang disahkan oleh 20 seniman dan sastrawan yang mendukungnya.

Melihat proses penciptaan naskah Manifes Kebudayaan, sepertinya penting dan menarik untuk dilihat rancangan Manifes Kebudayaan sebelum menganalisis naskah Manifes Kebudayaan yang telah disahkan. Hal ini menjadi penting dan menarik karena dengan melihat rancangan tersebut dapat diketahui ideologi konseptor Manifes Kebudayaan sebenarnya sebelum naskah tersebut diperbincangkan di forum oleh para manifestan.

Dalam naskah Manifes Kebudayaan, setidaknya ada empat hal yang ingin disuarakan oleh manifestan. Pertama, mereka menolak adanya subordinasi pada bidang kebudayaan terkait dengan adanya semboyan politik adalah panglima yang disebarluaskan Lekra. Kedua, Manifes Kebudayaan menolak semboyan “tujuan menghalalkan cara” karena menurut mereka, semboyan itu akan menghasilkan karya-karya yang bersifat propaganda semata. Ketiga, mereka menerima paham humanisme universal yang diartikannya sebagai sebuah perjuangan budi nurani

universal untuk memerdekakan setiap manusia dari belenggunya. Keempat, Manifes Kebudayaan menolak semboyan “politik di atas estetika” dan “estetika di atas politik”. Semboyan “politik di atas estetika” menurut Manifes Kebudayaan akan mengakibatkan karya sastra hanya dijadikan alat oleh para politisi untuk mencapai tujuan. Sementara itu, semboyan “estetika di atas politik” juga ditolak Manifes Kebudayaan karena membuat seseorang tidak mementingkan masalah politik dan sosial.

3.1. Rancangan Naskah Manifes Kebudayaan

Rancangan naskah Manifes Kebudayaan terdiri atas 16 halaman. Rancangan naskah ini diselesaikan Wiratmo Soekito pukul 04.00 WIB tanggal 17 Agustus 1963. Setelah mempelajarinya, Goenawan Mohamad dan Bokor Hutasuhut menandatangani. Naskah ini kemudian akan diajukan ke dalam sidang yang dihadiri oleh manifestan tanggal 23 Agustus 1963.

“Sebuah Manifes Kebudayaan” menjadi judul utama naskah ini. Pernyataan kebudayaan tersebut terdiri atas empat paragraf dan tiga bagian penjelasan, yaitu (1) kepribadian dan kebudayaan nasional, (2) kaum politisi dan karyawan, dan (3) politisi dan estetisi.

Rancangan Manifes Kebudayaan ini menyatakan bahwa Manifes Kebudayaan diumumkan karena sudah waktunya untuk menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan mereka. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran mereka terhadap para budayawan Indonesia dalam menciptakan karya-karya kreatifnya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

KAMI, pengarang², pelukis², pemusik², tsendekiawan² Indonesia dengan ini mengumumkan SEBUAH MANIFES KEBUDAJAAN, karena telah tibalah saatnja untuk dengan terang²-an menjatakan pendirian, tjita² dan politik kebudajaan nasional kami.

Telah terbukti adanja ketakutan² dari hati jang kerdil terhadap kaum budajawan Indonesia jang dengan patriotisme dan ketjintaannja

mendjalankan kegiatan2 kreatifnja sebagai pengabdian jang mutlak kepada Tuhan, nusa dan bangsa, demokrasi, humanisme dan sosialisme.¹

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa Manifes Kebudayaan lahir karena kondisi kebudayaan yang mengkhawatirkan pada saat itu. Jika dilihat lebih jauh, pernyataan tersebut lahir dari adanya dominasi Lekra, sebagai organisasi kebudayaan terbesar di Indonesia pada masa itu. Lekra tampaknya memberi tekanan kepada para seniman dan sastrawan untuk mengikuti paham dan semboyan yang dianutnya. Pada masa itu, semboyan “politik adalah panglima”, “seni untuk rakyat”, dan paham realisme sosialis terus-menerus dipropagandakan Lekra. Seniman dan sastrawan yang tidak setuju dengan ideologi mereka diserang. Hal seperti ini dialami oleh beberapa manifestan. Melihat kondisi kesenian dan kesusastraan yang terpasung oleh Lekra ini, manifestan menyatakan sikapnya terhadap masalah kebudayaan.

Dalam naskah tersebut, mereka menyatakan bahwa sudah waktunya mengumumkan pernyataan kebudayaan karena mereka ingin menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak humanisme universal yang diusung oleh angkatan 45 dan realisme sosialis yang dianut oleh pengarang dan seniman tahun 50-an. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Sesungguhja regenerasi revolusi Indonesia tidak dapat dipisahkan dgn regenerasi kebudajaan Indoesia. Oleh sebab itu kami jang mendukung MANIFES ini hendak menjatakan pendirian kami jang terusterang bahwa kami tidak dapat pula menempuh djalan apa jang dinamakan humanisme universal oleh apa jang dinamakan Angkatan 45 karena digurui oleh doktrin2 kebudajaan jang tidak sesuai dengan kondisi2 objektif kami; tetapi sebaliknya kami tidak dapat pula menempuh djalan apa jang dinamakan realisme sosialis oleh sedjumlah pengarang dan seniman dalam tahun2 50-an karena digurui pula oleh doktrin2 kebudajaan jang tidak sesuai dgn kondisi2 objektif kami.²

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mereka dengan berani menyatakan tidak setuju dengan paham yang dianut oleh para seniman dan

¹ Wiratmo Soekito, H. B. Jassin, dan Bokor Hutasuhut, “Sebuah Manifes Kebudayaan,” 17 Agustus, 1963, hal. 1. Tulisan ini dapat dilihat di Pusat Dokumentasi H. B. Jassin.

² *Ibid*, hlm. 1.

sastrawan angkatan 45 dan tahun-tahun 50-an. Para pengarang dan seniman tahun 50-an yang mereka maksud, penulis anggap sebagai pengarang Lekra. Hal ini disebabkan para pengarang dan seniman Lekra menyatakan menganut aliran realisme sosialis, seperti yang telah diungkapkan pada bab dua. Para manifestan tidak setuju dengan paham kedua golongan tersebut karena paham yang dianut tidak sesuai dengan ideologi manifestan. Ketidaksetujuannya tersebut lebih lanjut dijelaskan pada bagian penjelasan naskah ini. Pernyataan tersebut tampaknya membuat sebuah penilaian bahwa kaum Manifes Kebudayaan begitu berani menyatakan sikapnya di tengah-tengah dominasi Lekra yang begitu kuat dalam bidang kebudayaan pada masa itu.

Tidak hanya berani menyatakan sikap untuk menolak paham humanisme universal yang dianut angkatan 45 dan realisme sosial dari Lekra, manifestan juga menyatakan bahwa mereka bukanlah pelarian politik yang berlindung atas nama kebudayaan. Hal ini terdapat mungkin karena terkait dengan kondisi masa itu. Pada masa itu, begitu banyak organisasi kebudayaan yang lahir yang diciptakan oleh partai-partai politik, seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN/PNI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra/PKI), Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi/NU), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI/Masyumi), Lembaga Kebudayaan Indonesia Katholik (LKIK/Partai Katholik), Lembaga Kebudayaan dan Seni Muslim Indonesia (Lakmi/PSII), dan Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi/Perti). Manifestan ingin menyatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang seperti itu. Mereka merupakan sekelompok budayawan yang ingin menyatakan dengan tegas pendiriannya tentang masalah kebudayaan masa itu. Mereka menyatakan bahwa mereka menolak adanya subordinasi pada bidang kebudayaan. Hal ini terkait dengan adanya semboyan “politik adalah panglima” yang dijalankan dan disebarluaskan Lekra pada masa itu.³ Pernyataan manifestan tersebut dapat terlihat pada kutipan berikut

MANIFES kami ini akan membuktikan dgn se-terang2-nja bahwa kami bukanlah pelarian kaum politisi jang berlindung dibalik topeng kebudajaan karena bagi kami kebudajaan tidaklah merupakan sub-ordinasi

³ Penjelasan mengenai semboyan politik adalah panglima yang dianut Lekra telah dikemukakan pada bab II.

politik, dan oleh karena itulah kami bukan politisi, melainkan karjawang sebagai konsekwensi jg tak mungkin kami hindari bermaksud mengamankan Revolusi Indonesia, bukan dgn tjara jg defensif sadja, tetapi terutama dgn tjara jg sekreatif2-nja. Oleh karena itu tidaklah perlu diherankan apabila kami berlandaskan PANTJASILA sbg falsafah kebudajaan kami.⁴

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mereka menyatakan diri bukan sebagai politisi, melainkan karyawan kebudayaan.⁵ Mereka mengumumkan Manifes Kebudayaan ini untuk menyelamatkan revolusi Indonesia. Manifestan mengungkapkan ingin mengamankan revolusi Indonesia dengan cara yang kreatif, bukan dengan cara defensif. Pernyataan ini sepertinya terkait dengan kondisi kesusastraan dan kesenian masa itu ketika Lekra secara ofensif melakukan penyebaran paham-paham yang dianutnya, seperti realisme sosialis dan semboyan “politik adalah panglima”. Orang-orang atau organisasi yang tidak setuju dengan mereka diserang seperti yang dialami oleh salah satu manifestan, yaitu H.B. Jassin.

Pada bagian penjelasan yang pertama, “Kepribadian dan Kebudayaan Nasional”, manifestan mengungkapkan ideologi yang diusung para manifestan. Dari rancangan naskah Manifes Kebudayaan dapat diketahui bahwa manifestan menganggap kebudayaan bukanlah barang mati. Kebudayaan merupakan perjuangan manusia untuk menyempurnakan kondisi hidupnya. Oleh karena itu, mereka mengambil kesimpulan bahwa kebudayaan nasional adalah perjuangan nasional dari suatu bangsa sebagai suatu totalitas dalam menyempurnakan kondisi hidup nasional bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Dalam pengertian kami jg bersumber dlm hikmah PANTJASILA kebudajaan bukanlah kondisi objektif, apalagi hasil sbg barang mati.

Dlm pengertian kami kebudajaan adalah perdjoangan manusia sbg totalitas dlm menjempurnakan kondisi2 hidupnja. Oleh sebab itu pula maka Kebudajaan Nasional bukanlah semata2 ditandai oleh “watak nasional”, tetapi kebudajaan Nasional adalah perdjoangan nasional dari

⁴ Wiratmo Soekito, H. B. Jassin, dan Bokor Hutasuhut, “Sebuah Manifes Kebudayaan,” 17 Agustus 1963, hlm. 1. Tulisan ini dapat dilihat di Pusat Dokumentasi H. B. Jassin.

⁵ Karyawan kebudayaan merupakan istilah yang dipakai oleh seniman dan sastrawan pada masa itu untuk menyebut orang yang bekerja di bidang seni dan sastra.

suatu bangsa sbg totalitas dlm menjempurnakan kondisi2 hidup nasionalnja.

Manifestan kemudian menambahkan bahwa kebudayaan nasional yang dimaksud oleh manifestan adalah sebuah perjuangan manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan harga diri nasional di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa. Kebudayaan nasional tersebut digerakkan oleh kepribadian nasional yang mencoba untuk memisahkan diri dari campur tangan penguasa dan asing. Campur tangan asing yang dimaksud manifestan adalah campur tangan Barat. Perlu diketahui bahwa pada masa itu Indonesia begitu memusuhi Barat dan menyebutnya sebagai imperialis. Hal ini dapat tergambar dari kutipan berikut

Betapa djelasnja pengertian Kebudayaan Nasional sbg perdjongan untuk memperkembangkan dan mempertahankan harga-diri nasional ditengah2 masjarakat bangsa2. Djadi Kepribadian Nasional jg merupakan implikasi dari Kebudayaan Nasional kita itu adalah apa jg oleh Presiden Soekarno dirumuskan sbg “Freedom to be free”, sehingga Kebudayaan Nasional kita digerakkan oleh suatu Kepribadian Nasional jg membebaskan-diri dari penguasaan (tjampurtangan) asing, tetapi bukan untuk mengasingkan diri dari masjarakat bangsa2 melainkan djustru untuk menjatukan diri dgn masjarakat bangsa2/setjara bebas dan dinamik sbg persjaratan2 jg tak dapat ditawar bagi perkembangan jg pesat dari Kepribadian dan Kebudayaan Nasional kita jg pandangan-dunianja bersumber pada PANTJASILA.⁶

Manifestan mengungkapkan bahwa pernyataan kebudayaan yang kemudian dinamakan Manifes Kebudayaan tersebut juga bermaksud untuk membuktikan bahwa Pancasila menolak semboyan “*The End Justifies the Means*”. “*The End Jutifies the Means*” merupakan semboyan Lekra. Menurut mereka, semboyan tersebut akan menciptakan karya-karya di bidang kebudayaan yang bersifat propaganda semata. Hal ini disebabkan semboyan tersebut lebih mementingkan tujuan daripada cara yang digunakan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

MANIFES ini ingin membuktikan bahwa sbg falsafah demokrasi PANTJASILA menolak sembojan: “The End Justifies the Means” tsb., pendeknja apabila tidak diakui perbedaan antara tudjuan dan tjara sehingga orang menudju tudjuan dgn menjisihkan kepentinganja tjara mentjapainja. Demikianlah umpamanja di bidang pentjiptaan karja2 artistik dimana orang lebih mementingkan aspek propagandanja daripada aspek kesusastrannja, adalah setjara corralair merupakan pelaksanaan dari sembojan “The End Justifies and The Means” sbg suatu sembojan jg bertentangan dgn PANTJASILA. “The End justifies the Means”—apabila orang mengemukakan apa jg bukan kesusastraan sbg kesusastraan, apa jg bukan kesenian sbg kesenian, apa jg bukan ilmu-pengetahuan, dsb. Perkosaan seperti itu bukanlah tjara insanijah, melainkan tajara alamiah. Perkosaan adalah mentah sedang pentjiptaan karja mengalahkan kementahan dgn tjara manusia untuk mentjiptakan dunia jg damai, dimana dapat dilakukan pendidikan jg paling sempurna. Kesenian sbg penjiptaan karja manusia akan abadi hanja apabila bukan sadja tudjuan adalah kemanusiaan, tetapi apabila tjaranja adalah kemanusiaan dan itulah implikasi jg paling esensial dari PANJTASILA sbg falsafah demokrasi jg kami perdjoangkan setjara prinsipil.⁷

Perjuangan kebudayaan diungkapkan manifestan memiliki dua jenis bahaya. Bahaya tersebut dikatakan mereka berasal dari orang-orang yang mengambil pola kebudayaan asing sebagai konsep pendidikan nasional dan orang-orang yang mengajarkan pemujaan yang berlebihan hingga mengakibatkan adanya kebekuan budaya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Dalam perdjoangan itu kami menghadapi dua matjam bahaya:

Pertama, bahaya jg pertama datagnja dari pendidik2 gadungan jg mengatas nama pendidikan nasional mengambil pola kebudajaan asing sebagai konsep pendidikan nasional.

Kedua, bahaya jg lain datagnja dari ketjenderungan pendidik gadungan pula jg mengadjarkan pemudjaan2 demikian rupa, sehingga menimbulkan kebekuan kebudajaan.⁸

Pernyataan yang menyebutkan bahwa bahaya yang mengancam kebudayaan berasal dari kebudayaan asing yang kemudian dijadikan konsep pendidikan nasional mungkin disebabkan masa itu pemerintah Indonesia begitu antipati dengan Barat. Sementara itu, pernyataan bahaya yang datang dari orang-

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

orang yang mengajarkan pemujaan merupakan reaksi terhadap sikap Lekra yang begitu mendewakan partainya. Hal ini tercermin dari semboyan Lekra, "politik adalah panglima". Semboyan tersebut mempunyai pengertian bahwa kepentingan partai di atas segalanya, termasuk juga sastra. Sastra Lekra harus tunduk kepada kepentingan partai, yaitu PKI. Hal inilah yang coba diungkapkan manifestan.

Pada masa itu, bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Kata revolusi didengungkan di mana-mana. Ketika itu, revolusi menjadi dewa. Setiap karya sastra harus bersifat revolusioner.⁹ Bahkan Lekra sebagai organisasi kebudayaan terbesar pada masa itu menjuluki seniman dan sastrawan yang menciptakan karya yang dinilai tidak mengabdikan kepada kepentingan revolusi, maka dianggap kontrarevolusioner. Oleh karena itu, dalam pernyataan tersebut manifestan ingin menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya pendewaan yang berlebihan terhadap revolusi.

Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada pernyataan manifestan pada paragraf selanjutnya yang menyatakan bahwa bahaya yang paling mengancam kebudayaan adalah adanya kecenderungan "fetisi" atau pendewaan. Kesusastraan diharuskan untuk mengabdikan kepada pelindungnya. Adanya pendewaan atau pemujaan dalam kehidupan kesusastraan ini dikatakan akan melahirkan kesusastraan yang bercorak *fausse devotion* atau kesusastraan yang diciptakan untuk mengabdikan kepada sesuatu yang sifatnya pengabdian yang pura-pura. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Adapun bahaja bagi kebudajaan jg paling mengantjam datangnja dari wilayahnja sendiri, tetapi jg terang inilah bahwa sumber pokok dari bahaja tsb terletak dlm ketjenderungan2 fetisj sebagai ketjenderungan non-kreatif. Memang ketjenderungan tsb manifestasinja tidak hanja dlm pendewaan, melainkan terdapat djuga dlm pensjetanan sbg umpamanja jg kami kenal dlm wilajah kesusastraan. Sbg mana fetisj2 itu bermatjam2, demikianlah pula kesusastraan2 fetisj. Sbg mana terdapat fetisjisme dari djiwa-pelindung di samping fetisjisme dari djiwa-pendendam, demikianlah kesusastraan jg mengabdikan kepada djiwa-pelindung dgn memberikan sandjungan2 setjara ber-lebih2-an, berikan fitnahan2 setjara ber-lebih2-an pula. Tidak djarang terdjadi bahwa kedua matjam kesusastraan fetisj itu mempunjai pretense "kesusastraan revolusioner", tetapi dlm halnja

⁹ Penjelasan lebih lanjut mengenai sastra revolusioner dapat dilihat pada bab 2.

demikian maka kesusastraan² fetisj itu kita namakan kesusastraan dgn “fausse devotion” sbg pengabdianja, jaitu pengabdian pura².¹⁰

Manifestan menyatakan bahwa mereka tidak memperdewakan atau menyembah-nyembah revolusi. Walaupun demikian, mereka juga mengungkapkan bahwa mereka tidak pula mempersetankan revolusi. Jika dilihat lebih jauh, terlihat ideologi manifestan bahwa mereka tunduk kepada revolusi, tetapi revolusi tersebut jangan dijadikan sebagai dewa yang semua aspek kehidupan harus mengabdikan kepada revolusi. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Kesusastraan kreatif, berlawanan dgn kesusastraan fetisj, tidak mentjari sumbernja dlm fetisj², melainkan dlm dirinja sendiri, sehingga dgn ini kami menolak fetisjisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Kesusastraan seperti itu djika menjokong revolusi tidaklah bersumber dlm fetisjisme dari djiwa-pelindung, sebaliknya djika mengkritik ekses² revolusi tidaklah pula bersumber dlm fetisjisme dari djiwa pendendam. Kami tidak memperdewakan Revolusi karena kami tidak mempunyai “fausse devotion”; sebaliknya kamipun tidak mempersetankan Revolusi karena kami tidak pula mempunyai “fausse devotion”. Tetapi kami adalah revolusionair!¹¹

Dalam bagian penjelasan kedua yang berjudul “Kaum Politisi dan Karyawan” terlihat paham yang dianut manifestan, yaitu humanisme universal. Humanisme universal ini disesuaikan dengan kondisi-kondisi dan cita-cita bangsa Indonesia. Sebelum menyatakan bahwa mereka menerima humanisme universal, manifestan mengungkapkan ada tiga tafsiran humanisme yang menurut mereka penting untuk diungkapkan pada Manifest Kebudayaan tersebut. Humanisme universal yang pertama bersumber dari surat kepercayaan gelanggang yang dianut oleh angkatan 45. Humanisme universal yang kedua bersumber dari pemikiran Mao Tse Tung. Sementara itu, humanisme universal ketiga bersumber dari pikiran

¹⁰ Wiratmo Soekito, Goenawan Mohamad, dan Bokor Hutasuhut, “Sebuah Manifest Kebudayaan,” 17 Agustus, 1963, hlm. 3. Tulisan ini dapat dilihat di Pusat Dokumentasi H. B. Jassin.

¹¹ *Ibid*, hlm. 4.

kebudayaan dan kesusastraan nasional. Humanisme universal yang ketiga inilah yang diterima oleh para manifestan.

Dalam rancangan naskah Manifest Kebudayaan para manifestan mengungkapkan menolak humanisme yang bersumber dari pemikiran Mao Tse Tung karena humanisme tersebut akan mengaburkan garis pemisah antara kawan dan lawan. Manifestan juga menolak humanisme universal yang bersumber dari surat kepercayaan gelanggang karena mereka tidak menyetujui adanya konsep “warisan kebudayaan”. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Ada tiga tafsiran tentang humanisme universal, tafsiran² mana perlu kami kemukakan. Tafsiran yang pertama bersumber dalam surat-kepertjajaan “Gelanggang Seniman Merdeka” yang disusun pada tanggal 18 Februari 1950: “Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan tjara kami sendiri”. Hampir seluruh pengertian kami tentang kebudayaan, karena bagi kami kebudayaan bukanlah kondisi objektif, sehingga tidaklah mungkin kita menerima warisan kebudayaan, apalagi kebudayaan dunia. Teranglah sudah bahwa yang dimaksudkan dengan kebudayaan dunia adalah kebudayaan Barat. Kami akan menerangkan bahwa sekiranya demikianlah adanya maka kami menolak humanisme universal itu.¹²

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa para manifestan tidak menganut humanisme universal yang diangkat oleh angkatan 45. Walaupun keduanya menganut paham humanisme universal, humanisme universal mereka berbeda. Manifestan tidak setuju dengan pernyataan adanya warisan kebudayaan yang diungkapkan angkatan 45. Lebih lanjut lagi manifestan menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan konsep adanya kebudayaan dunia. Manifestan mengungkapkan bahwa kebudayaan dunia itu tidak ada. Mereka berpendapat seperti ini karena menurut mereka kebudayaan dunia terlalu luas dan akhirnya mengakibatkan kebudayaan tersebut tidak jelas. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut

Memang benarlah bahwa ketjenderungan kulturil dalam menghajati nilai² universal, tetapi meneruskan kebudayaan dunia dalam arti memandang kebudayaan dunia itu sebagai kondisi² objektif, sebagai

¹² *Ibid*, hlm. 4—5.

warisan sedjarah, dilihat dari sudut ilmiah dan psychology tidaklah dapat dipertanggung-djawabkan. Pikiran tentang kebudajaan dunia sebagai jang dirumuskan oleh Surat-Kepertjajaan Seniman Muda itu dipandang dari sudut idealisme anak2 muda jang belum mempunyai dasar berfikir jang kuat dapatlah kita mengerti, tetapi dalam fikiran kami kebudajaan dunia itu tidak ada, dan tidak akan pernah ada. Pengertian kebudajaan dunia itu terlalu luas, dan karenanja terlalu kabur.¹³

Sebenarnya manifestan juga menganut humanisme universal. Namun, humanisme universal yang diterimanya mempunyai syarat. Manifestan menerima humanisme universal apabila humanisme universal tersebut diartikan sebagai sebuah perjuangan dari budi nurani universal untuk memerdekakan setiap manusia dari belenggu yang mengukungnya. Hal ini disebabkan manifestan menyadari bahwa setiap manusia pasti menginginkan kebebasan. Kebebasan inilah yang sebenarnya ingin disuarakan manifestan, khususnya kebebasan dalam berkarya.

Manifestan kembali tidak menyetujui humanisme universal jika humanisme universal tersebut membuat orang bersikap *indifferent* atau tidak membedakan semua paham atau aliran yang ada. Sikap yang tidak membedakan tersebut akan membuat manusia toleran terhadap kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itu, manifestan tetap dengan tegas memisahkan diri dengan musuh-musuh kebudayaan. Namun, hal ini lantas tidak membuat mereka menjadi sektaris dan chauvinis atau membenci orang-orang yang dianggap musuh. Mereka menganggap bahwa musuh mereka bukanlah manusia. Musuh mereka adalah unsur-unsur yang membelenggunya. Unsur-unsur yang membelenggunya ini sebenarnya adalah paham atau ideologi yang dianutnya. Sikap ini membuktikan sifat humanis para manifestan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan, manifestan juga mengungkapkan bahwa sejahat-jahat manusia, tetapi tetap memancarkan nilai Illahi atau nilai kebaikan. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa manifestan memang memegang kuat kehumanisan mereka. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Musuh kami bukanlah manusia, karena kami adalah manusia. Musuh kami adalah unsur2 jang membelenggu manusia, dan karenanja kami ingin membebaskan manusia itu dari belenggu2nja. Dalam

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

perlawanan kami terhadap musuh2 kami itu kami tetap berpegang teguh pada pendirian dan pengertian bahwa sedjahat2nja manusia namun ia masih tetap memantjarkan sinar-tjahaja Illahi, sehingga konsekwensi kita ialah bahwa kita harus menjelamatkan sinar-tjahaja Illahi tersebut.¹⁴

Pada kutipan di atas dapat ditinjau lebih dalam bahwa pernyataan tersebut sepertinya lahir sebagai reaksi atas tindakan yang dilakukan Lekra terhadap orang ataupun organisasi yang ideologinya berseberangan dengan Lekra. Pada masa itu, Lekra sebagai organisasi kebudayaan yang begitu kuat kedudukannya menyerang orang atau organisasi yang berlawanan paham dengan mereka. Salah satu contohnya adalah penyerangan terhadap H.B. Jassin karena menganut humanisme universal.

Selain mengungkapkan paham yang diterimanya, manifestan juga mengungkapkan kritik terhadap orang-orang yang bersifat chauvinis, fanatik, dan sektaris. Chauvinis adalah orang-orang yang menganut paham kebangsaan yang menganggap bangsanya lebih atau superior daripada bangsa lain. Sektaris adalah orang-orang yang terkungkung pada satu aliran saja. Sementara itu, fanatik merupakan orang-orang yang begitu kuat keyakinannya terhadap ajaran atau paham yang dianutnya. Orang-orang yang bersifat demikian dianggap akan menghancurkan persatuan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Persatuan jang telah kita bangun dengan susah-pajah ini hendaklah tidak digerogoti dari dalam oleh unsur2 negatif seperti fanatisme, chauvinisme dan sektarisme itu dengan teriakan2 jang menuduh sekutu2nja sendiri sebagai munafik dan sematjamnja, jang dilapangan kebudajaan teriakan itu berbunji humanisme universal, karena mentjurigai kegiatan2 nasional kreatif atas dasar kompleks kurang harga diri dan iri hati semata2.¹⁵

Dari kutipan di atas terlihat bahwa manifestan bukan hanya ingin mengkritik orang atau organisasi yang cenderung fanatik, chauvinis, dan sektaris. Lebih jauh lagi dapat dilihat bahwa pernyataan tersebut merupakan reaksi dari manifestan terhadap perlakuan yang mereka terima dalam bidang kebudayaan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

pada masa itu. Penulis menginterpretasikan orang-orang yang dikritik manifestan tersebut adalah Lekra dan kawan-kawannya. Pada masa itu, para seniman dan sastrawan Lekra begitu tunduk dengan partainya yaitu PKI. Hal ini mengakibatkan para seniman dan sastrawan Lekra terlihat sektaris, chauvinis, dan fanatik terhadap partainya. Dalam hal kesusastraan, karya sastra Lekra harus tunduk pada kepentingan partai. Kegiatan sastra para sastrawan Lekra harus mengikuti ketentuan PKI. Penilaian karya sastra dilihat dari bobot politik komunisme yang terdapat di dalamnya. Sebuah karya sastra dinilai baik apabila karya tersebut membantu kepentingan PKI, dan sebaliknya, jika tidak membantu dan tidak sejalan dengan ideologi PKI, karya tersebut akan dinilai buruk.

Melalui kutipan di atas juga dapat terlihat bahwa manifestan ingin mengkritik sikap Lekra yang sering menyerang orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Dalam hal ini, orang-orang yang tidak sepaham dengan Lekra maksudnya adalah orang-orang yang menganut humanisme universal. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Lekra menuduh musuh-musuhnya sebagai orang munafik. Manifestan dengan berani menyatakan bahwa serangan tersebut disebabkan adanya kecurigaan Lekra terhadap tindakan kebudayaan dan sifat iri hati semata.

“Politisi dan Estetisi” merupakan judul pada penjelasan Manifest Kebudayaan bagian ketiga. Pada bagian ini manifestan menjelaskan hubungan antara politik dan estetika. Manifestan menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak semboyan “politik di atas estetika”. Menurut mereka semboyan “politik di atas estetika” mengakibatkan karya sastra hanya dijadikan sebagai alat oleh para politisi untuk membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Maka dapatlah kami mengambil kesimpulan bahwa faham politik di atas estetika yang merumuskan bahwa politik adalah primair dan estetika sekunder dilihat dari sudut kebudayaan dan kesenian adalah suatu utopia yang di jalau hendak dilaksanakan dengan jujur akan memupuk dan menghasilkan perasaan keketjawaan dan yang di jalau hendak dilaksanakan dengan tidak jujur akan dapat merupakan tipu-muslihat kaum politis yang ambisius.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11.

Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya pernyataan tersebut merupakan kritik kepada Lekra yang menganut semboyan “politik adalah panglima”. Semboyan “politik adalah panglima” secara tidak langsung akan menempatkan kesenian dan kesusastraan menjadi subordinasi politik. Hal inilah yang ditolak oleh Manifestan. Manifestan mengungkapkan bahwa semboyan “politik di atas estetika” sebenarnya tidak sesuai dengan paham realisme yang dianut Lekra. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Apabila dunia ini sudah sempurna tidak perlu lagi adanya pengarang dan meskipun dunia ini dapat mendekati kesempurnaan namun dunia tidak akan sempurna. Oleh karena itu paham yang merumuskan bahwa politik adalah primair dan estetika adalah sekunder tidak memahami realisme karena apabila kekuatan politik telah menjadi sempurna tidak perlu lagi kesusastraan, tidak perlu lagi estetika. Umpamanya pada suatu ketika kekuatan politik yang kita bentuk itu telah menjadi sempurna maka masalah apakah yang akan dibahas oleh kesusastraan revolusionair yang sebagai estetika murni baru mulai setelah itu? Tidak lebih dan tidak kurang daripada masalah yang dibahas oleh kaum estetika, yaitu mereka yang mempunyai paham estetika di atas politik, sehingga bersifat burjuis.¹⁷

Manifestan juga tidak setuju dengan semboyan “estetika di atas seni”. Hal ini disebabkan semboyan tersebut membuat seseorang tidak mementingkan masalah politik dan sosial. Paham “estetika di atas seni” dapat dijalankan apabila mendapat sandaran politik kuat atau negara tersebut telah mempunyai kekuatan politik yang besar. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Tidaklah berlebihan kiranya apabila kami mengambil kesimpulan bahwa paham politik di atas estetika itu tidak memberikan tempat kepada estetika sebelum pembentukan kekuatan politik menjadi sempurna, sehingga selama jangka waktu pembentukan kekuatan politik itu tak ada persoalan tentang estetika, sedangkan paham estetika di atas politik dapat dijalankan apabila mendapat sandaran kekuatan politik yang sempurna pula.¹⁸

Oleh karena itu, Manifestan mengambil sikap sendiri. Mereka tidak setuju semboyan “politik di atas estetika” dan “estetika di atas seni”. Mereka mengambil

¹⁷ *Ibid*, hlm 11.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15.

suatu paham yang tidak mengorbankan estetika bagi politik dan juga tidak mengorbankan politik bagi estetika. Menurut manifestan, kedua bidang tersebut harus berjalan bersama-sama untuk membangun masyarakat sosialis Pancasila.

Dalam bagian penjelasan rancangan Manifes Kebudayaan ini ada sebuah pernyataan yang begitu menarik. Manifestan menyatakan bahwa melalui Manifes Kebudayaan tersebut mereka mengumumkan kelahiran sebuah angkatan baru. Mereka menamakan diri mereka sebagai angkatan perlawanan nasional. Hal ini menarik untuk dicermati bahwa mereka begitu berani menyebut manifestan sebagai angkatan perlawanan nasional. Dari pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa mereka mengambil sikap oposisi terhadap angkatan sebelumnya, yaitu yang disebut mereka angkatan 50-an. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Menurut kejakinan kami maka masyarakat sosialis Pantja Sila yang kami perjuangkan setjara kultural-revolusionair itu adalah suatu keharusan sedjarah yang tak dapat dihindarkan oleh siapapun, tetapi terutama oleh kami sendiri, sehingga tidak bisa lain yang dapat kami perbuat daripada mengumumkan kelahiran ANGKATAN PERLAWANAN NASIONAL ditengah penghianatan Angkatan 50-an yang tak bertanggung djawab itu.

Demikianlah MANIFES ini diumumkan kepada Rakjat Indonesia dengan terus terang dan dengan hati terbuka yang diinsafi oleh rasa rendah hati.¹⁹

Pada kutipan di atas terlihat jelas bahwa sebenarnya pernyataan tersebut lahir sebagai perlawanan terhadap angkatan 50 yang pengarangnya didominasi oleh pengarang Lekra. Jadi, dapat terlihat bahwa Manifes Kebudayaan lahir sebagai reaksi terhadap situasi kebudayaan yang pada masa itu didominasi oleh Lekra. Bahkan dari kutipan di atas, manifestan dengan berani menyebutkan bahwa sastrawan angkatan 50 merupakan angkatan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mereka mendeklarasikan Manifes Kebudayaan sebagai sebuah perlawanan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 16

3.2 Naskah Manifes Kebudayaan

Naskah Manifes Kebudayaan yang disahkan sebelumnya mengalami perbaikan dari rancangannya. Naskah Manifes Kebudayaan ini ditandatangani oleh 22 orang. Ada beberapa perbedaan antara naskah yang telah disahkan dengan rancangan naskah. Perbedaan yang paling terlihat yaitu pada bagian pernyataan naskah Manifes Kebudayaan. Jika pada rancangan Manifes Kebudayaan diuraikan bahwa mereka menolak paham humanisme universal yang dianut angkatan 45 dan realisme sosial yang merupakan paham angkatan 50, pada naskah Manifes Kebudayaan yang telah disahkan justru sama sekali pernyataan ini tidak diungkapkan. Mereka justru mengungkapkan posisi sektor-sektor kebudayaan yang harus sejajar dan tidak ada subordinasi. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Bagi kami kebudajaan adalah perdjoangan untuk menjempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudajaan diatas sektor kebudajaan jang lain. Sektor-sektor berdjoang bersama-sama untuk tudjuan kebudayaan ini sesuai dengan kodratnja.²⁰

Dari kutipan di atas dapat terlihat dengan jelas apa yang ingin disuarakan para manifestan. Manifestan mengungkapkan bahwa mereka tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Mereka ingin setiap sektor berjuang bersama-sama. Mereka terlihat begitu menekankan hal ini karena pada masa itu begitu “semboyan politik adalah panglima” semakin kuat gaungnya. Hal inilah yang ingin ditolak para manifestan. Hal ini tidak diungkapkan di bagian pernyataan umum rancangan Manifes Kebudayaan, tetapi diletakkan di bagian penjelasan. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan penekanan terhadap hal-hal yang dianggap penting.

Pada paragraf selanjutnya, manifestan menyatakan ideologi humanisme universalnya. Mereka menyatakan akan berusaha mencipta atau berkarya dengan kesungguhan sebagai suatu perjuangan untuk mempertahankan martabat bangsa

²⁰ “Manifes Kebudayaan,” naskah asli Manifes Kebudayaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi H. B. Jassin, hlm. 1.

Indonesia di tengah-tengah masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Dalam melaksanakan kebudayaan Nasional kami berusaha mentjipta dengan kesungguhan jang sedjujur-djudjurnja sebagai perdjoangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengah masjarakat bangsa-bangsa. Pantjasila adalah falsafah kebudayaan kami.²¹

Dari kutipan di atas dapat terlihat ideologi manifestan. Mereka menganut humanisme universal, yaitu bahwa mereka ingin memperjuangkan martabat bangsa di tengah-tengah masyarakat dunia. Pada kutipan di atas juga terlihat bahwa manifestan menempatkan Pancasila sebagai falsafah kebudayaan mereka. Hal ini juga cukup berbeda bila dibandingkan dengan pernyataan umum yang terdapat di rancangan Manifes Kebudayaan. Pada pernyataan umum di rancangan Manifes Kebudayaan, manifestan tidak berbicara sama sekali tentang hal tersebut.

Naskah Manifes Kebudayaan yang telah disahkan juga terdiri dari tiga bagian penjelasan. Namun, judul-judul penjelasan tersebut berbeda dengan rancangannya. Bagian-bagian penjelasan tersebut yaitu (1) Pancasila sebagai falsafah kebudayaan, (2) kepribadian dan kebudayaan, dan (3) politisi dan estetisi.

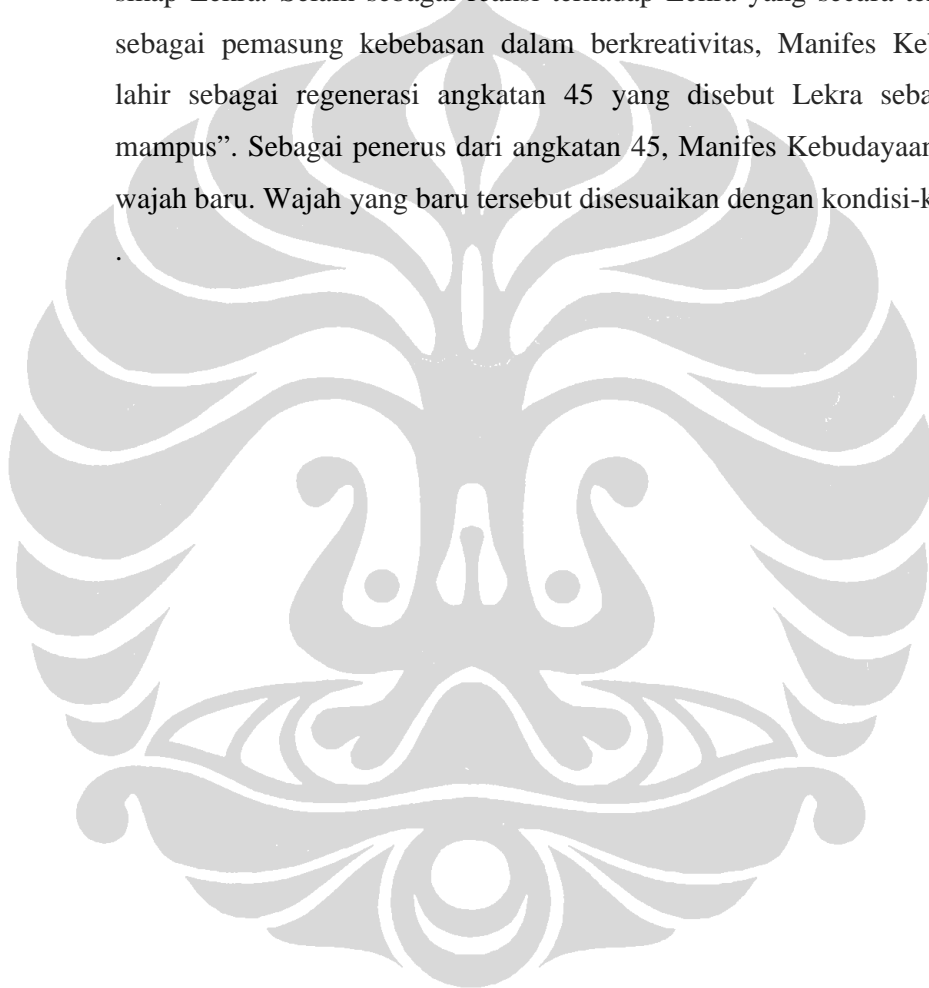
Pada umumnya di bagian penjelasan, isi yang diungkapkan tidak jauh berbeda dengan rancangannya. Pada naskah yang telah disahkan, isi penjelasan-penjelasan tersebut lebih ringkas daripada rancangannya. Selain itu, di bagian penjelasan naskah Manifes Kebudayaan yang telah disahkan juga tidak ada kalimat-kalimat yang berupa kritik tajam seperti yang ada di dalam rancangan. Pernyataan bahwa naskah Manifes Kebudayaan tersebut mengumumkan lahirnya sebuah angkatan baru, yaitu angkatan perlawanan nasional juga tidak disebutkan di naskah Manifes Kebudayaan yang telah disahkan.

Tampaknya naskah yang telah disahkan tersebut berusaha mengurangi pernyataan-pernyataan yang cenderung terdengar keras. Hal ini tampaknya terkait oleh situasi pada masa itu yang menempatkan Manifes Kebudayaan sebagai pihak minoritas atas Lekra. Selain itu, jika ditinjau lebih jauh, penghalusan bahasa tersebut juga menunjukkan bahwa para manifestan tampaknya menerapkan paham

²¹ *Ibid*, hlm. 1.

humanisme universalnya ke dalam kehidupan nyata. Sikap humanis yang terlihat dari pernyataan-pernyataan dalam naskah Manifes Kebudayaan membuktikan bahwa mereka merupakan seniman dan sastrawan yang konsisten dengan ideologi yang diusungnya.

Dari hasil analisis naskah tersebut dapat terlihat bahwa sebenarnya Manifes Kebudayaan lahir sebagai reaksi para seniman dan sastrawan terhadap sikap Lekra. Selain sebagai reaksi terhadap Lekra yang secara tersirat dianggap sebagai pemasung kebebasan dalam berkeaktivitas, Manifes Kebudayaan juga lahir sebagai regenerasi angkatan 45 yang disebut Lekra sebagai “angkatan mampus”. Sebagai penerus dari angkatan 45, Manifes Kebudayaan menampilkan wajah baru. Wajah yang baru tersebut disesuaikan dengan kondisi-kondisi saat itu.



BAB 4 REAKSI TERHADAP MANIFES KEBUDAYAAN

Manifes Kebudayaan merupakan sebuah pernyataan beberapa seniman dan sastrawan yang tidak ingin berdiri di bawah naungan partai. Sebagai sebuah pernyataan kebudayaan, Manifes Kebudayaan dapat dilihat sebagai reaksi terhadap kondisi kebudayaan masa itu. Manifestan melalui Manifes Kebudayaan mencoba untuk mengungkapkan suara mereka dalam bidang kebudayaan. Lahirnya Manifes Kebudayaan ternyata mendapat reaksi yang begitu besar dari masyarakat, khususnya seniman, sastrawan dan organisasi-organisasi kebudayaan. Reaksi ini ada yang berupa dukungan dan ada juga berupa penolakan. Para seniman dan sastrawan yang setuju maupun yang kontra saling mengungkapkan pendapatnya tentang Manifes Kebudayaan dalam berbagai media massa di Indonesia pada masa itu.

4.1 Reaksi dari Pihak yang Mendukung Manifes Kebudayaan

Manifes Kebudayaan merupakan sebuah pernyataan kebudayaan yang pada awal kelahirannya ditandatangani 22 seniman dan sastrawan. Para seniman dan sastrawan tersebut adalah H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Bokor Hutasuhut, Goenawan Mohammad, A. Bastari Asnin, Bur Rasuanto, Soe Hok Djin, D.S. Moeljanto, Ras Siregar, Hartoyo Andangjaya, Syahwil, Djufri Tanissan, Binsar Sitompul, Taufiq A.G. Ismail, Gerson Poyk, M. Saribi, Poernawan Condronogoro, Ekana Siswoyo, Nashar dan Boen S. Oemarjati. Para pendukung Manifes Kebudayaan ini menyebut dirinya sebagai manifestan. Manifestan merupakan sebutan bagi para pendukung Manifes Kebudayaan yang oleh PKI diplesetkan menjadi manikebuis.

Bila dilihat dari tokoh yang menandatangani Manifes Kebudayaan, dapat terlihat bahwa mereka merupakan seniman dan sastrawan yang aktif dalam majalah *Sastra*. H.B. Jassin merupakan pimpinan majalah *Sastra*, sedangkan D.S. Moeljanto sebagai redaktur penyelenggara. Bur Rasuanto, A. Bastari Asnin, Ras Siregar, Gerson Poyk merupakan pengarang-pengarang cerpen dalam majalah

Sastra. Goenawan Mohamad dan M. Saribi merupakan penyair majalah *Sastra*. Sementara itu, Wiratmo Soekito, Soe Hok Djinn, dan Boen S. Oemarjati sering menulis juga esai dan kritiknya dalam majalah tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa Manifest Kebudayaan umumnya dipelopori oleh orang-orang *Sastra*. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa *Sastra* menjadi sponsor utama dan corong pergerakan para pendukung Manifest Kebudayaan.

Beberapa simpatisan pendukung Manifest Kebudayaan pun terus bermunculan setelah diumumkannya Manifest Kebudayaan di harian *Berita Republik* dan majalah *Sastra* pada 19 Oktober 1963. Naskah Manifest Kebudayaan juga semakin tersebar luas setelah beberapa media massa ikut menyiarkan naskah tersebut. Media massa yang juga ikut menyiarkan naskah Manifest Kebudayaan di antaranya adalah harian *Semesta* (Jakarta), harian *Berita Republik* (Jakarta), mingguan *Duta Masyarakat* (Jakarta), mingguan *Gelora* (Surabaya), mingguan *Pos Minggu* (Semarang), mingguan *Surakarta* (Solo), majalah *Basis* (Yogyakarta), mingguan *Waspada Teruna* (Medan), dan harian *Indonesia Baru* (Medan).

Sebenarnya, sebelum diumumkan di berbagai media massa, naskah Manifest Kebudayaan ini telah dikirim kepada sastrawan dan seniman Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik dukungan dari sastrawan dan seniman Indonesia. Tampaknya cara manifestasi ini cukup berhasil. Beberapa organisasi dan individu pun terus menyatakan dukungannya kepada Manifest Kebudayaan. Mereka menyatakan dukungannya melalui surat-surat yang dikirimnya kepada H. B. Jassin.¹ Beberapa pernyataan dukungan tersebut kemudian dimuat di dalam *Sastra* yang merupakan majalah pimpinan H. B. Jassin.

Manifest Kebudayaan pada saat itu sepertinya membawa sebuah angin segar bagi kebebasan berkarya dan mencipta. Pernyataan sikap itu rupanya disambut dengan baik oleh beberapa organisasi kebudayaan dan seniman Indonesia yang memang mengharapkan kebebasan dalam berkreasi setelah sekian lama PKI dengan organisasi kebudayaannya, yaitu Lekra, mencoba menekan para seniman dan sastrawan untuk mengikuti garis kebudayaannya. Hal ini terbukti dari cukup banyaknya organisasi dan perseorangan yang mendukung Manifest

¹ Surat-surat dari pendukung Manifest Kebudayaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi H. B. Jassin.

Kebudayaan. Bahkan *Berita Republik* mencatat bahwa pada bulan Februari 1964, yaitu setelah empat bulan Manifes Kebudayaan diumumkan, Manifes Kebudayaan telah mempunyai 35 organisasi dan 5000 perseorangan yang mendukungnya.²

Ada berbagai alasan yang menyebabkan mereka mendukung Manifes Kebudayaan. Dalam *Genta Revolusi* tanggal 27 April 1964, tujuh organisasi mahasiswa menyatakan mendukung Manifes Kebudayaan yang dimuat di artikel yang berjudul “7 Organisasi Mahasiswa Dukung Manifes Kebudayaan”.³ Ketujuh organisasi tersebut adalah Gerakan Mahasiswa Indonesia Cabang Medan, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan, Perhimpunan Katholik RI Cabang Medan, GAMKI Sumatera Utara, GMK Cabang Medan, Pemuda Katholik Sumatera Utara, dan Pelajar Islam Indonesia. Mereka menyatakan mendukung Manifes Kebudayaan karena isi dari naskah Manifes Kebudayaan dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila dan Manifesto Politik. Mereka dengan berani menyatakan mendukung Manifes Kebudayaan walaupun pada masa itu terdapat pro-kontra mengenai masalah Manifes Kebudayaan dan adanya keputusan dari Front Sumatera Utara tanggal 19 Maret 1964 yang menyatakan menolak setiap manifes di bidang kebudayaan, olahraga dan lain-lain yang bertentangan dengan Manifesto Politik RI. Mereka tetap mendukung Manifes Kebudayaan karena mereka tidak melihat isi dan hakekat Manifes Kebudayaan yang berlawanan dengan Pancasila dan Manifesto Politik RI. Oleh karena itu mereka mengungkapkan bahwa tidak ada alasan untuk menolak Manifes Kebudayaan.

Jika dilihat dari naskah Manifes Kebudayaan, memang tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menentang Manipol. Walaupun memang di dalam naskah tersebut tidak disebutkan secara implisit bahwa Manifes Kebudayaan berdasarkan Manipol, ada beberapa pernyataan yang ternyata didasari dari Manifesto Politik. Salah satunya yaitu pernyataan yang mengungkapkan bahwa rakyat tidak ingin ditindas oleh bangsa lain, tidak ingin dieksploitir oleh golongan apapun. Mereka menginginkan adanya kebebasan. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut

² “Pendukung2 Manifes Kebudayaan Setudju Statement LKN Pusat,” *Berita Republik*, Februari, 1964.

³ “7 Organisasi Mahasiswa Dukung Manifes Kebudayaan,” *Genta Revolusi*, 27 April, 1964, hlm. 3.

...kebudajaan universal itu merupakan “kekuatan yang menggerakkan sedjarah”, dan itu sepenuhnya sama dengan pikiran kami bahwa kebudayaan universal itu adalah perjuangan dari budi nurani universal dalam memerdekakan setiap manusia dari rantai-rantai belenggunya, perjuangan yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan Rakyat Indonesia, karena rakyat dimana-mana dibawah kolong langit itu tidak mau ditindas oleh bangsa-bangsa lain, tidak mau dieksploitir oleh golongan2 apapun, meskipun golongan itu adalah bangsanja sendiri mereka menuntut kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan dari rasa-takut, baik yang karena ancaman didalam-negeri maupun yang karena ancaman dari luar-negeri; mereka menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif aktivitas sosialnja, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat; mereka menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yaitu menuntut hak-hak yang lazimnja dinamakan demokrasi.⁴

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa beberapa pernyataan yang ada di dalam naskah Manifest Kebudayaan diambil dari Manifesto Politik. Dalam Manifesto Politik, Soekarno menyebutkan bahwa ia berkeyakinan rakyat di muka bumi adalah sama, yaitu mereka tidak ingin ditindas oleh bangsa lain dan tidak ingin dieksploitir oleh golongan apapun. Selain itu, rakyat juga ingin kebebasan. Pernyataan Soekarno tersebut yang akhirnya disebut dengan Manifesto Politik tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut

Rakyat di mana-mana di kolong langit ini, tidak mau ditindas oleh bangsa lain, tidak mau dieksploitir oleh golongan apa pun, meskipun golongan itu adalah dari bangsanya sendiri.

Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut, baik yang karena ancaman di dalam negeri, maupun yang karena ancaman dari luar negeri.

Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk menggerakkan secara konstruktif ia punya aktivitiet-sosial, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat.

Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yaitu menuntut hak-hak yang lazimnja dinamakan demokrasi.⁵

⁴ Naskah asli Manifest Kebudayaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi H. B. Jassin, hlm. 2.

⁵ Wawn Tunggul Alam (ed.), *Demokrasi Terpimpin Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato)*, (Jakarta, 2001), hlm. 162.

Adanya persamaan pernyataan antara Manifesto Politik dan Manifesto Kebudayaan tersebut memperlihatkan bahwa Manifesto Kebudayaan tidak menentang Manifesto Politik. Bahkan Manifesto Kebudayaan justru sejalan dengan Manifesto Politik. Oleh karena itu, beberapa organisasi dan individu mendukung Manifesto Kebudayaan karena berkeyakinan Manifesto Kebudayaan tidak bertentangan dengan Manifesto Politik.

Dukungan terhadap Manifesto Kebudayaan tidak hanya didengungkan oleh organisasi mahasiswa dan organisasi pemuda. Manifesto Kebudayaan juga didukung oleh lembaga-lembaga kebudayaan. Dukungan terhadap Manifesto Kebudayaan bukanlah suatu aksi simpati belaka, tetapi betul-betul merupakan dukungan nyata. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebelum menyatakan dukungannya terhadap Manifesto Kebudayaan, para pendukungnya membaca dengan saksama dan memikirkannya dengan matang.

Salah satu contohnya yaitu beberapa organisasi kebudayaan dan kesenian di Palembang. Sebelum menyatakan dukungannya terhadap Manifesto Kebudayaan, mereka mengadakan diskusi terlebih dahulu untuk memutuskan hal tersebut. Akhirnya, delapan organisasi kebudayaan dan kesenian serta mahasiswa Palembang seperti Badan Pembina Teater Nasional Indonesia, Lembaga Seni Sastra Palembang, Lesbumi Palembang, Teater Muslim Palembang, Himpunan Seni Budaya Islam, Ikatan Pencita Seni, Himpunan Bekas Pelajar Quraniah, dan Pelajar Islam Indonesia menyatakan mendukung Manifesto Kebudayaan.⁶

Selain dari organisasi mahasiswa, organisasi pemuda maupun organisasi kebudayaan lainnya, dukungan kepada Manifesto Kebudayaan juga datang dari individu-individu atau perseorangan. Pernyataan dukungan tersebut dimuat di beberapa media massa, seperti majalah *Sastra*. Berikut ini merupakan salah satu contoh pernyataan dukungan yang datang dari perseorangan

Bersama ini saja menyatakan mendukung sepenuhnya Manifesto Kebudayaan yang lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 1963 dengan tidak mengurangi dan atau menambah segala isi dan intinya. Disamping itu pun mendukung sepenuhnya terlaksananya Musjawarah Karyawan Pengarang Indonesia.

⁶ "Pernyataan Organisasi-organisasi Pendukung Manifesto Kebudayaan," *Sastra*, 1963, hlm. 2.

Semoga segala hasil dan djerih pajahnja menjadi pegangan bagi kita para pengarang dan budajawan Indonesia jang tidak tjondong kesalah satu Negara luar manapun (tanpa ketjuali) jang mentjoba memperlalat kebudajaan/kesenian untuk kepentingan propaganda politik dan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja.⁷

4.2 Reaksi dari Pihak yang Kontra-Manifes Kebudayaan

Semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang angin yang menghembusnya. Begitulah juga yang dialami oleh Manifes Kebudayaan. Semakin banyak yang menyatakan mendukung Manifes Kebudayaan, semakin banyak pula serangan yang ditujukan kepadanya.

Begitu banyak organisasi dan perseorangan yang menyatakan menolak Manifes Kebudayaan. Berbagai organisasi dan perseorangan tersebut beramai-ramai menyatakan penolakannya terhadap Manifes Kebudayaan di media massa. Surat kabar yang menjembatani mereka tersebut di antaranya merupakan surat kabar yang dikuasai Lekra, seperti *Bintang Timur*, dan *Harian Rakyat*. Organisasi atau badan yang menolak Manifes kebudayaan di antaranya adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Lembaga Seniman dan Budayawan Indonesia (Lesbi), Lembaga Kebudayaan nasional (LKN), Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi), Himpunan Pengarang Indonesia (HIMPI), Himpunan Seni Budayawan Indonesia (HSBI), Konperensi Pengarang Asia Afrika (KPAA), dan gerakan mahasiswa lainnya.

Dari beberapa organisasi atau badan yang disebutkan di atas, Lekra merupakan organisasi kebudayaan yang paling agresif dalam menyatakan penolakannya dan melakukan serangan-serangannya terhadap Manifes Kebudayaan. Mereka menyerang para penanda tangan dan pendukung Manifes Kebudayaan karena ideologi yang dianutnya tidak sesuai dan cenderung kontrarevolusioner. Lekra kemudian secara agresif memberitakan ketidaksetujuan mereka terhadap Manifes Kebudayaan dalam media-media massa yang

⁷ “Dukungan atas Lahirnja Manifes Kebudajaan”, *Sastra*, 1964, hlm. 2.

dikuasainya dan mengajak organisasi-organisasi untuk menyerang Manifes Kebudayaan.

Hal ini tampaknya merupakan reaksi yang wajar apabila dilihat sejak terjang Lekra sebelumnya yang begitu giat menekan dan menghantam organisasi ataupun individu yang berseberangan ideologinya, seperti Hamka dan H.B. Jassin. Oleh karena itu, penyerangan yang membabi buta terhadap Manifes Kebudayaan yang dilakukan oleh Lekra di berbagai media massa tersebut tidaklah mengherankan lagi, apalagi jika dikaitkan dengan hasil analisis pada bab tiga yang memperlihatkan bahwa naskah Manifes Kebudayaan sebenarnya merupakan reaksi atas ideologi-ideologi dan tindakan Lekra di bidang kebudayaan yang memasung kemerdekaan berkreativitas para seniman dan sastrawan.

Pernyataan-pernyataan yang menolak Manifes Kebudayaan pun semakin ramai setelah para manifestan dan budayawan lain, seperti Wiratmo Soekito, Zaini, dan Goenawan Mohamad berhasil menyelenggarakan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). KKPI ini diselenggarakan pada tanggal 1—7 Maret 1964 di gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran, Jakarta. KKPI ini mampu mengundang 1455 peserta dan 45 organisasi di Indonesia untuk hadir dalam acara tersebut. KKPI ini menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI).

Setelah mengetahui bahwa para manifestan dan sastrawan lain berhasil menyelenggarakan sebuah konferensi besar yang mampu mengundang begitu banyak peserta dan organisasi, Lekra dan kawan-kawannya pun tampaknya merasa khawatir. Mereka sepertinya tidak menyangka bahwa manifestan mampu menyelenggarakan konferensi yang besar tersebut. Akhirnya, setelah konferensi itu diselenggarakan, Lekra tampaknya meningkatkan serangannya terhadap Manifes Kebudayaan yang dianggapnya mengancam keberadaannya tersebut.

Berbagai artikel yang berisi kecaman keras, lontaran-lontaran yang bernada mengejek, serta berbagai tuduhan lain terhadap Manifes Kebudayaan dipublikasikan Lekra dan kawan-kawannya di berbagai media massa. Lekra sebagai organisasi kebudayaan terbesar saat itu dan juga mempunyai kekuasaan yang cukup besar di bidang kebudayaan begitu giat melakukan aksi “pengganyangan” terhadap Manifes Kebudayaan khususnya setelah Manifes

Kebudayaan berhasil mengadakan KKPI. Oleh karena itu, pada masa itu media massa, khususnya media massa yang bergerak di bidang kebudayaan diwarnai oleh artikel-artikel yang berisi kecaman dan penolakan terhadap Manifes Kebudayaan.

Dari berbagai artikel yang menyatakan penolakan dan kecaman terhadap Manifes Kebudayaan dan pendukungnya, setidaknya ada enam hal yang membuat mereka menyatakan penolakannya. Hal tersebut di antaranya adalah adanya anggapan bahwa Manifes Kebudayaan kontrarevolusi. Kekontrarevolusioneran Manifes Kebudayaan ini menurut mereka dapat dilihat dari isi naskah Manifes Kebudayaan. Dikatakan mereka bahwa Manifes Kebudayaan menganut paham humanisme universal, menolak tujuan menghalalkan cara, dan Manifes Kebudayaan juga dianggap melemahkan revolusi karena anti Nasakom dan ingin menandingi Manipol.

Tidak hanya menyerang ideologi para manifestan yang tertuang dalam naskah Manifes Kebudayaan, mereka juga menyerang individu-individu pendukung Manifes Kebudayaan, terutama konseptor dan penandatangan naskah Manifes Kebudayaan. Penyerangan terhadap individu para manifestan bahkan lebih gencar dilakukan daripada memperdebatkan ideologi Manifes Kebudayaan sendiri.

4.2.1. Penyerangan terhadap Ideologi Manifes Kebudayaan

Sejak awal, Lekra dan kawan-kawannya begitu gencar menyatakan bahwa Manifes Kebudayaan berwatak kontrarevolusioner. Suatu tindakan kontrarevolusioner pada masa itu dianggap merupakan tindakan kejahatan. Orang yang dianggap kontrarevolusioner atau melemahkan jalannya revolusi akan dijebloskan ke dalam penjara oleh Presiden Soekarno. Inilah yang tampaknya menjadi tujuan Lekra dan kawan-kawannya untuk membuktikan bahwa Manifes Kebudayaan berwatak kontrarevolusioner. Dengan membangun opini besar bahwa Manifes Kebudayaan kontrarevolusioner, tujuan untuk menghancurkan Manifes Kebudayaan tampaknya akan lebih mudah tercapai.

Setidaknya ada enam tuduhan Lekra terhadap para manifestan yang menyebabkan Manifest Kebudayaan dianggap kontrarevolusioner. Faktor-faktor tersebut yaitu (1) Manifest Kebudayaan menganut humanisme universal, (2) Manifest Kebudayaan ingin menandingi Manifesto Politik, (3) Manifest Kebudayaan menolak politik sebagai panglima, (4) Manifest Kebudayaan menolak semboyan “tujuan menghalalkan cara”, (5) Manifest Kebudayaan anti-Nasakom, dan (6) Manifest Kebudayaan menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi.

4.2.1.1 Manifest Kebudayaan Menganut Humanisme Universal

Dalam naskah Manifest Kebudayaan, kita dapat melihat bahwa manifestan menyatakan setuju dengan paham humanisme universal. Paham humanisme universal yang disetujui oleh manifestan yaitu apabila humanisme universal itu mengakui kebudayaan universal yang merupakan perjuangan dalam memerdekan manusia dari rantai yang membelenggunya. Hal ini disebabkan menurut manifestan rakyat di mana pun di dunia ini tidak menginginkan adanya penindasan. Mereka menginginkan adanya kebebasan.

Paham humanisme universal yang dianut Manifest Kebudayaan inilah yang kemudian menjadi bahan serangan Lekra dan kawan-kawannya. Sebenarnya, serangan terhadap paham humanisme universal telah dilakukan Lekra sejak angkatan 45 menyatakan paham humanisme universalnya yang tertulis di surat kepercayaan gelanggang. H. B. Jassin juga terus-menerus diserang oleh pengarang Lekra karena menganut humanisme universal. Kemudian, Lekra pun kini menyerang Manifest Kebudayaan dengan lebih keras lagi karena juga menganut paham humanisme universal.

Tampaknya Lekra tetap tidak bisa menerima ideologi paham humanisme universal Manifest Kebudayaan. Walaupun manifestan mengungkapkan bahwa humanisme universal mereka bersyarat, Lekra tampaknya menganggap bahwa sekali humanisme universal tetap saja humanisme universal. Mereka tetap melanjutkan serangan mereka terhadap humanisme universal. Menurut mereka, paham humanisme universal adalah paham yang dianut oleh orang-orang

imperialis dan kolonialis. Humanisme universal yang dianut para seniman dan sastrawan dianggap membuat para seniman dan sastrawan tersebut tidak peduli dengan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Kita tidak usah lagi bertanja sebab sedjak tahun 1945 sastrawan2 setjara perorangan maupun organisasi sudah berbuat sebagai kaju dalam api revolusi, dan tidak seperti kelompok ini jang masih bertanja2 djuga. Jang sudah dipahami oleh mereka ialah apa jang dinamakan “Humanisme Universil”. Faham jang dalam banjak hal senada sadja dengan kepentingan kaum imperialisme kolonialis, dan sering sekali tidak memperdulikan penderitaan rakjat karena bumi mereka ada djauh diluar perbatasan negaranja sendiri.⁸

Pernyataan bahwa humanisme universal menguntungkan kaum imperialis dan kolonialis juga diungkapkan Darmawan Dinarto dalam tulisannya yang berjudul “Lagu dan Jubah baru Seniman Humanisme Universal”.⁹ Ia mengungkapkan bahwa humanisme universal membela kaum imperialisme. Oleh karena itu humanisme universal bertentangan dengan Manipol USDEK yang pada masa itu telah dijadikan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pernyataan bahwa Manifestasi Kebudayaan bertentangan dengan Manipol USDEK yang diungkapkan oleh Darmawan Dinarto didasari dari anggapan bahwa humanisme universal yang dianut Manifes Kebudayaan membela kepentingan imperialis. Dalam teks Manifesto Politik memang dapat dilihat bahwa Soekarno mengajak rakyat Indonesia memusuhi imperialis. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa ia dengan keras menentang paham imperialisme. Namun, paham humanisme universal yang dituduhkan Darmawan Dinarto bertentangan dengan Manipol karena dianggap membela kaum imperialis tampaknya kurang beralasan. Humanisme universal justru ingin mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, bukan untuk menginjak hak-hak bangsa lain.

Lebih lanjut lagi dikatakan Lekra dan kawan-kawannya bahwa dengan menganut ideologi humanisme universal, berarti Manifes Kebudayaan telah menunjukkan dengan sendirinya bahwa Manifes Kebudayaan berwatak kontrarevolusi. Mereka membuktikan bahwa humanisme universal berwatak

⁸ “Ramai tentang Manikebu & KK-PSI,” *Warta Bhakti*, 1 Maret, 1964.

⁹ A. Wahid Situmeang, “Humanisme Universil Seirama dengan Pancasila,” *Sastra*, 26 Januari, 1964.

kontrarevolusi dengan menyerang isi naskah Manifes Kebudayaan yang menyatakan bahwa kebudayaan universal merupakan perjuangan dari budi nurani universal dalam memerdekakan setiap manusia dari rantai-rantai yang membelenggunya.¹⁰ Humanisme universal dianggap kontrarevolusi karena tidak menarik garis pemisah yang tegas antara kawan dan lawan. Paham humanisme universal yang ingin memerdekakan setiap manusia tersebut dianggapnya membela kaum imperialis karena bersifat kompromis terhadap lawan.

Jika dilihat di dalam naskah Manifes Kebudayaan, kita dapat melihat bahwa paham humanisme universal yang dianut Manifes Kebudayaan tidaklah berseberangan dengan revolusi. Paham humanisme universal menginginkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Tentunya humanisme universal ini menolak imperialisme dengan tegas karena imperialisme mebiarkan orang asing menginjak hak-hak bangsa lain.

4.2.1.2 Manifes Kebudayaan Anti-Manifesto Politik

Opini yang juga berkembang di berbagai media massa adalah adanya penilaian bahwa Manifes kebudayaan ingin menandingi Manifesto Politik. Manifesto Politik merupakan pernyataan politik yang lahir atas pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Manifesto Politik ini kemudian dijadikan sebagai landasan dalam perjuangan revolusi pada masa demokrasi terpimpin tersebut. Tuduhan Manifes Kebudayaan anti-Manipol yang dilontarkan Lekra dan kawan-kawannya pada masa itu membuat cap “kontrarevolusioner” semakin melekat pada para manifestan.

D. N. Aidit yang merupakan ketua PKI yang juga merupakan Menteri Koordinator serta Wakil Ketua MPRS menyerang Manifes Kebudayaan dengan mengatakan bahwa Manifes Kebudayaan kontra-Manipol. Dalam artikel *Bintang Timur* yang berjudul “Manikebu adalah Usaha Kasar untuk Mengebiri Revolusi”, ia menjelaskan bahwa Manifes Kebudayaan anti-Manifesto Politik karena dalam naskah Manifes Kebudayaan tidak disebutkan sama sekali kata Manifesto

¹⁰ “Manifes Kebudayaan,” naskah asli Manifes Kebudayaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin, hlm. 5.

Politik.¹¹ Walaupun di dalam Manifes Kebudayaan telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah kebudayaannya, menurut D. N. Aidit, hal tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa para manifestan tidak kontra-Manipol. Oleh karena itu, D. N. Adit mengatakan bahwa Manifes Kebudayaan merupakan usaha kasar untuk mengebiri revolusi. Tampaknya dari pernyataan D. N. Aidit dapat dilihat bahwa ia melakukan sebuah tuduhan yang kurang beralasan karena menyebut Manifes Kebudayaan kontra-Manifesto Politik hanya karena kata-kata tersebut tidak ada di dalam naskah Manifes Kebudayaan.

Tokoh lain yang juga melakukan penyerangan terhadap para manifestan dengan mengatakan bahwa Manifes kebudayaan kontrarevolusioner karena anti-Manipol adalah Bakrie Siregar. Artikel *Bintang Timur* yang berjudul “Kita Terlalu Tjinta Manipol, karena itu Kita Gasak Manikebu!” memberitakan bahwa di depan masyarakat Surabaya, tanggal 29 Maret 1964, di Gedung Pemuda, Bakrie Siregar berceramah bahwa demi kecintaan terhadap Manipol, Manifes kebudayaan harus dihancurkan. Ia mengatakan bahwa Manifes Kebudayaan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mengkhianati Manifesto Politik. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Mengapa kita begitu bernapsu menggajang Manikebu ini? Djawabnja sederhana sekali: Karena kita begitu tjinta pada Manipol. Demikian Prof. Bakri Siregar dimuka masjarakat Surabaya dalam tjeramah umumnja jang diadakan di Gedung Pemuda, 29 Maret jang lalu.

Djustru karena kita begitu tjinta pada Manipol, kita gajang ini Manikebu, jang berusaha mengkhianati Manipol. Karena itu kaum kontra repolusi dan kaum revisionis perlu kita gajang habis2! Demikian Prof. Bakri Siregar selandjutnja.¹²

Pada kutipan di atas dapat terlihat dengan jelas kecaman Bakri Siregar yang bernada keras terhadap Manifes Kebudayaan. Ia berpendapat bahwa Manifes Kebudayaan berusaha untuk mengkhianati Manifesto Politik yang dicetuskan Soekarno. Oleh karena itu, para manifestan dianggap sebagai kontrarevolusi yang harus “diganyang”.

¹¹ “Manikebu adalah Usaha Kasar untuk Mengebiri Revolusi,” *Bintang Timur*, 22 Maret, 1964.

¹² “Kita Terlalu Tjinta Manipol, karena itu Kita Gasak Manikebu!”, *Bintang Timur*, 3 April, 1964, hlm. 3.

Bakri Siregar menambahkan bahwa Manifes Kebudayaan mengkhianati Manifesto Politik karena Manifes Kebudayaan mempunyai tujuan untuk menghancurkan revolusi dengan cara melupakan perjuangan dan menghilangkan garis pemisah antara kawan dan lawan. Jika dilihat dari pernyataan Bakrie Siregar mengenai Manifes Kebudayaan yang mencoba menghilangkan garis pemisah antara kawan dan lawan, tampaknya pendapat ini lahir dari pernyataan yang ada di dalam naskah Manifes Kebudayaan yang menyebutkan bahwa sejahat-jahatnya manusia, ia masih tetap memancarkan sinar cahaya Illahi atau kebaikan karena manifestan percaya bahwa manusia adalah makhluk yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Musuh kami bukanlah manusia, karena kami adalah anak manusia. Musuh kami adalah unsur-unsur jang membelenggu manusia, dan karenanja kami ingin membebaskan manusia itu dari rantai-rantai belenggunja. Dalam perlawanan kami terhadap musuh-musuh kami itu kami tetap berpegang teguh pada pendirian dan pengertian bahwa sedjahat-djahatnja manusia namun ia masih tetap memantjarkan sinar-tjahaja Illahi, sehingga konsekwensi kita ialah bahwa kita harus menjelamatkan sinar-tjahaja Illahi tersebut.¹³

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, A. Karim D.P. juga tampaknya tidak ingin ketinggalan untuk menyatakan bahwa Manifes Kebudayaan anti-Manipol. Bahkan lebih keras lagi, ia menyatakan bahwa Manifes Kebudayaan merupakan usaha untuk menandingi Manipol. Hal ini dapat terlihat dari artikel *Warta Bhakti* yang berjudul “Manikebu Tandingan Manipol jg Berselimut Kebudajaan”. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat A. Karim D.P. dengan tegas telah mengetjam Konperensi Karyawan Pengarang Indonesia jg disponsori oleh kaum “Manifes Kebudajaan”, bahwa agaknja dengan “Manifes Kebudajaan” itu mereka hendak mentjiptakan Manifes jang lain disamping Manifesto Politik Bung Karno.

.....

“Apakah tulisan2 mereka jg membela “Manikebu” jg hendak mentjiptakan tandingan bagi Manipol dengan berselimut “kebudajaan”,

¹³ “Manifes Kebudayaan,” Naskah asli Manifes Kebudayaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin, hlm. 6.

bukan tulisan yang justru tidak konstruktif, tulisan yang destruktif bahkan menjurus ke-kotra-revolusi?" bertanya Ketua PWI Pusat itu selanjutnya.¹⁴

Tidaklah mengherankan jika pernyataan tersebut datang dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia memang pada saat itu didominasi oleh orang-orang Lekra. Oleh karena itu, seniman dan sastrawan Lekra secara bergantian ingin menyerang Manifesto kebudayaan dengan menuduh bahwa Manifesto Kebudayaan kontrarevolusioner.

Dari pernyataannya tersebut, A. Karim D. P. tidak menyebutkan alasannya mengapa ia menganggap bahwa Manifesto Kebudayaan ingin menandingi Manifesto Politik. Lagi-lagi tampaknya kita melihat bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap Manifesto Kebudayaan tidak disertai dengan alasan yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Jika dilihat dari isi Manifesto Kebudayaan, akan ditemukan beberapa pernyataan yang sama dengan Manifesto Politik seperti yang telah diungkapkan di bagian sebelumnya. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa tuduhan Manifesto Kebudayaan anti-Manipol kurang beralasan. Selain itu juga dapat dilihat bahwa tuduhan tersebut dilontarkan sebagai alat agar Manifesto Kebudayaan dilarang oleh Soekarno karena menentang salah satu ajarannya, yaitu Manipol.

4.2.1.3 Manifesto Kebudayaan Menolak Politik sebagai Panglima

Para manifestan melalui naskah Manifesto Kebudayaan menyatakan bahwa mereka menolak adanya subordinasi politik dan paham "politik di atas estetika". Para manifestan menolak hal tersebut karena semboyan tersebut hanya akan melahirkan karya yang bersifat propaganda semata. Pernyataan tersebut sepertinya merupakan reaksi atas ideologi Lekra yang dengan gencar mempropagandakan semboyan "politik adalah panglima". Semboyan tersebut tentulah secara langsung menempatkan politik di atas estetika. Oleh karena itu, Lekra dan kawan-kawannya mencoba membela diri dan kemudian menyerang kembali para pendukung

¹⁴ "Manikebu Tandingan Manipol jg Berselimut Kebudayaan," *Warta Bhakti*, 9 Maret, 1964.

Manifes Kebudayaan dengan menyebut mereka kontrarevolusi karena menolak semboyan “politik sebagai panglima”.

Dalam kesempatan berceramah di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Yogyakarta, Pramoedya Ananta Toer dengan tegas mengungkapkan penolakannya terhadap Manifes Kebudayaan. Hal ini disebabkan para manifestan dalam naskah Manifes Kebudayaan mencoba menolak “politik sebagai panglima”. Pramoedya Ananta Toer berpendapat bahwa sastrawan merupakan politikus-politikus individual. Sebagai politikus individual, ia harus ikut aktif dalam perkembangan politik. Jika tidak aktif dalam perkembangan politik, maka karya yang diciptakannya akan berwatak kontrarevolusioner. Hal ini, menurutnya, disebabkan karya sastra yang revolusioner hanya dapat diciptakan oleh orang yang revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Pada permulaan tjeramahnja Pram mengatakan bahwa sastra sebagai ide selalu mendahului politik, tetapi sastra sebagai praktek sosial selalu tertinggal oleh praktek politik. Sastrawan hakikatnja adalah politikus² individual sedangkan politik merupakan pernyataan objektif daripada organisme² sosial. Karena itu sastrawan jang tidak ketinggalan dengan perkembangan politik para sastrawan harus ikut aktif dalam perjuangn Rakjat dan revolusinja. Sebab sastra revolusioner hanja bisa dilahirkan dari kepala sastrawan jang revolusioner. Sebaliknya, dari kepala kontrarevolusioner akan lahir pula karja² sastra jang kontrarevolusi.¹⁵

Achmad Munief dalam artikelnya yang berjudul “Dg Politik Sbg Panglima Madju Trs Ujudkan Tjita² R’lusi” yang dimuat di *Bintang Timur* mencoba membuktikan bahwa semboyan “politik dan panglima” yang diusung Lekra tidak bertentangan dengan cita-cita revolusi. Mereka mengungkapkan bahwa dengan semboyan “politik sebagai panglima”, orang-orang akan dibuatnya untuk bersikap sesuai dengan kondisi-kondisi politik. Selain itu, menurutnya “politik adalah panglima” dapat menunjukkan garis yang tegas siapa lawan dan kawan. Oleh karena itu, ia tahu sasaran yang dituju secara tepat. Hal ini diungkapkannya pada kutipan berikut

¹⁵ *Ibid.*

Apakah pemikiran "politik adalah panglima" bertentangan dengan tji2 Revolusi? Dengan tegas kita katakan tidak malah dengan lebih tegas lagi kita katakan djustru sesuai dgn malahan sebagai pelaksana Manipol, sebab pemegang pandji2 "Politik adalah panglima" tak pernah bersikap dan berbuat sebagai orang jang ditegaskan oleh Gesuri jg disinggung dimuka. Lain daripada itu, "Politik adalah panglima", menurut pendapat kita, disamping menundjukan djalan jang tepat menudju terwujudnja tji2 Revolusi 45, djuga memberi garis jang tegas siapa lawan dan siapa kawan dalam perdjalanannya itu sehingga setjara kongkrit kita tahu sasaran jang ditudju dengan tepat.¹⁶

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Achmad Munief menganggap dengan semboyan "politik adalah panglima" tidak bertentangan dengan revolusi. Bahkan sebaliknya, semboyan tersebut dapat mempercepat jalannya revolusi Indonesia. Hal ini diungkapkan karena semboyan tersebut membuat garis tegas antara kawan dan lawan. Jadi, menurutnya hal tersebut akan membuat lebih mudah bagi masyarakat untuk mengetahui musuh yang membahayakan revolusi.

Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa jika politik tidak lagi dijadikan sebagai panglima, hal tersebut akan membuat rakyat Indonesia tidak mempunyai panglima dan tidak mengetahui alat dan tujuan. Jika tidak mempunyai panglima serta tidak mengetahui alat dan tujuan, maka menurut Lekra, hal tersebut akan membuat masyarakat tidak mempunyai pegangan dalam melanjutkan jalannya revolusi. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Sebaliknya pemikiran "Tji2 Revolusi satu2nja panglima kebudajaan" dengan main akrobatik dengan Manipol, akan mengchianati Manipol itu, sebenarnja hanja akan menghasilkan pengaburan2 garis menudju tji2 Revolusi 45, akan mengaburkan tji2 jang kita tudju, sebab jang akan dijadikan panglimanja ialah "tji2" itu sendiri, sehingga pada hakekatnja kita akan dibuatnja tak punya panglima, jang dgn sendirinja kita dibuatnja tak tahu sasaran, jah, pada pokoknja kita akan dibuatkan ngawur dalam Revolusi, tak tahu mana alat mana tudjuan. Itulah pada hakekatnja tudjuan tjara berpikir mereka dengan politik-sastranja, seperti dapat kita lihat pada soal "Perdamaian Dunia" dimuka.¹⁷

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Lekra tampaknya mencoba menanggapi pernyataan manifestan yang menyatakan bahwa mereka menolak

¹⁶ Achmad Munief, "Dg Politik Sbg Panglima Madju Trs Ujudkan Tji2 R'lusi," *Bintang Timur*, 16 Juni, 1964, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*

”politik sebagai panglima”. Pernyataan manifestan tersebut kemudian dijadikan sebagai penyerangan balik oleh Lekra untuk menyerang Manifes Kebudayaan. Mereka menyatakan bahwa pernyataan yang menolak semboyan ”politik sebagai panglima” berarti mencoba untuk mengaburkan jalannya revolusi yang berarti mengkhianati Manifesto Politik. Kembali lagi kita lihat bahwa Lekra melakukan tuduhan yang bertujuan untuk mempertentangkan ajaran Soekarno dengan gagasan Manifes Kebudayaan.

4.2.1.4 Manifes Kebudayaan Menolak Semboyan “Tujuan Menghalalkan Cara”

Lekra juga menyerang ideologi Manifes Kebudayaan yang mencoba menolak semboyan ”the end justifies the means”¹⁸. Seperti yang telah diungkapkan pada bab tiga bahwa Manifes Kebudayaan menolak semboyan tersebut karena semboyan tujuan menghalalkan cara akan mengakibatkan orang tidak mementingkan cara yang dipakai dalam mencapai tujuan, yang dipentingkan adalah bagaimana tujuan tersebut tercapai. Manifestan menganggap bahwa hal ini dalam bidang penciptaan karya sastra akan melahirkan karya yang hanya mementingkan propaganda semata. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Demikianlah umpamanja di bidang pentjiptaan karja-karja kesenian dimana orang lebih mementingkan aspek propagandanja daripada aspek kesusastranja, adalah tjontoh pelaksanaan dari sembojan “The End Justifies and The Means”—apabila orang mengemukakan apa jang bukan kesusastraan sebagai kesusastraan, apa jang bukan kesenian sebagai kesenian, apa jang bukan ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan dsb.

Perkosaan seperti itu bukanlah tjara insanijah, melainkan tjara alamiah. Perkosaan adalah mentah sedang pentjiptaan karja mengalahkan kementahan dgn tjara manusia untuk mentjiptakan dunia jang damai, dimana dapat dilakukan pendidikan jang paling sempurna. Kesenian sebagai penjiptaan karja manusia akan abadi hanja apabila bukan sadja tudjuan adalah kemanusiaan, tetapi djuga tjaranja adalah kemanusiaan, dan itulah implikasi jang paling hakiki dari Pantjasila sebagai falsafah demokrasi jg kami perdjombangkan setjara prinsipil.¹⁸

¹⁸ “Manifes Kebudayaan,” Naskah asli Manifes Kebudayaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin, hlm. 3.

Lekra kemudian membalas pernyataan penolakan Manifes Kebudayaan mengenai semboyan "tujuan menghalalkan cara". Lekra menyerang Manifes Kebudayaan dengan mengatakan bahwa Manifes Kebudayaan menuduh Presiden Soekarno tidak beradab. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Sebelum saja sampai pada persoalannya baiklah saja tunjukkan: bahwa konseptor2 manifes jang berlagak anti pensetanan ini telah melakukan pengutukan terhadap sesuatu jg mulia setjara tidak se-mena2 kwalifikasi orang jang mementingkan propaganda diatas kesenian itu sebagai "tjara jang bukan insanijah melainkan alamijah". (ini istilah mereka)

Apakah ini artinja? Insanijah maksudnja cultuurmens alamijah maksudnja natuurmens; tidak berkebudajaan; tidak beradab; masih alam. Djadi Presiden Soekarno jang selalu mengatakan Manipol dulu baru seniman (propaganda Manipol diatas kesenian) itu tidak beradab! (Naudzubillah). Djadi jang dalam tingkat revolusi bersendjata melawan Belanda memakai kesenian sebagai alat propaganda untuk membangkitkan rasa tjinta pada tanah air; pada revolusi; untuk mengobarkan semangat membunuh musuh se-banjak2nja dan mengalahkan musuh dalam waktu jang se-pendek2nja itu namanja tidak beradab.¹⁹

Dari kutipan di atas dapat terlihat jelas bahwa Lekra menyerang Manifes Kebudayaan dengan menuduh bahwa Manifes Kebudayaan menganggap Presiden Soekarno tidak beradab. Lekra menuduh Manifes seperti itu karena Manifes Kebudayaan menyatakan bahwa mementingkan propaganda di atas kesenian merupakan cara alamiah, bukan ilmiah. Cara alamiah inilah yang ditafsirkan Lekra sebagai cara yang tidak berkebudayaan, bahkan diartikan sebagai cara yang tidak beradab. Pernyataan tersebut menurut Lekra sama saja menuduh bahwa Presiden Soekarno tidak beradab karena Presiden Soekarno mengatakan untuk mementingkan Manipol daripada kesenian.

Tampaknya dari pernyataan tersebut Lekra mencoba membenturkan ide-ide yang terdapat dalam Manifes Kebudayaan dengan Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai pemegang kekuasaan terbesar di Indonesia. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa Lekra menggunakan taktik adu domba yang menempatkan Manifes

¹⁹ "Manikebu Mau Tandingi Manipol!", *Suluh Indonesia*, 20 Maret, 1964.

Kebudayaan sebagai pihak yang melawan Soekarno. Hal ini bertujuan agar Manifes Kebudayaan dilarang pemerintah.

Lekra dan kawan-kawannya juga kembali menyerang Manifes Kebudayaan yang menolak “the end justifies the means”. Menurut Lekra, semboyan tersebut diperlukan untuk memudahkan jalannya revolusi. Lagi-lagi dapat terlihat bahwa Lekra menggunakan kata “sakti” yaitu revolusi untuk membenarkan ideologi dan pendapatnya.

Pengungkapan MANIFES tsb terhadap sembojan vulgar “THE END JUSTIFIES THE MEANS” rupanja kurang persiapan pikiran sehingga tidak mampu membeda2kan tjara dgn tudjuan dalam perbandingan besar ketjilnja peristiwa. Tudjuan memang tidak selalu mengalahkan tjara. Seorang pentjuri alam misalnja, tidaklah perlu mengalami hukuman mati. Tetapi bagaimana dengan peristiwa2 khusus dimana suatu kepentingan jang lebih besar terantjam? Pengalaman2 repolusi mengadjarkan bahwa seringkali kita terpaksa mengorbankan satu-dua orang untuk kepentingan kolektivum (rakjat) jang lebih besar. Demikian djuga misalnja, untuk menjelamatkan repolusi ini, kita tidak akan ragu2 menuntut hukuman mati bagi seorang koruptor besar jang menurut perhitungan telah mengorbankan kepentingan rakjat setjara mengerikan. Sebab, kalau kita tidak bertindak demikian maka rakjatlah jang mendjadi korban.²⁰

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Lekra membela diri dengan mengungkapkan bahwa semboyan “the end justifies the means” memang diperlukan untuk menyelamatkan revolusi Indonesia pada masa itu. Lekra menganalogikannya dengan seorang koruptor besar yang pantas untuk dihukum mati karena telah mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Lebih lanjut lagi, Lekra juga menganggap bahwa para penanda tangan Manifes Kebudayaan telah mengingkari fungsi kesenian dalam revolusi dengan menolak unsur propaganda dalam kesenian. Mereka beranggapan bahwa unsur propaganda penting dalam kesenian untuk melaksanakan tugas revolusi. Kesenian dan kesusastraan yang bersifat propaganda tersebut menurut Lekra dapat membangkitkan kesadaran rakyat untuk memelihara semangat nasional demi tercapainya cita-cita revolusi. Oleh karena itu, Lekra melihat bahwa sikap Manifes Kebudayaan yang menolak propaganda dalam kesenian dan kesusastraan

²⁰ *Ibid.*

memperlihatkan keapatisan mereka terhadap kondisi rakyat. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Manifes Kebudayaan kontrarevolusi.

Para penjusun dan penandatangan MANIFES tsb dgn sadar atau tidak sesungguhnya telah mengingkari fungsi kesenian dalam repolusi. Dengan tjaranja jang chas mereka menolak apa jang mereka anggap unsur 'propaganda' dalam kesenian, tidak peduli bahwa kondisi2 kemasjarakatan masih memerlukannya atau tidak. Seluruh masjarakat menurut logika mereka itu tidaklah memerlukan propaganda. Logika sematjam ini sebenarnja membuktikan betapa djauh apresiasi mereka terhadap faktor2 objektip dalam majarakat mereka tidak mengetahui bahwa indoktrinasi dalam taraf repolusi jang sekarang ini masih diperlukan, baik untuk mengikis habis apatisme, sisa2 pikiran kontrarevolusioner maupun untuk membangkitkan dengan memelihara kesadaran dan semangat nasional guna menyelesaikan repolusi ini.²¹

4.2.1.5 Manifes Kebudayaan Anti-Nasakom

Manifes Kebudayaan juga dianggap anti-Nasakom. Hal ini dilontarkan oleh A. S. Dharta yang menyatakan bahwa Manifes Kebudayaan anti-Nasakom terlihat dari tidak adanya tokoh komunis di antara pemuka-pemuka Manifes Kebudayaan. Selain itu, D. N. Aidit menambahkan bahwa Manifes Kebudayaan memang anti-Nasakom karena di dalam naskah Manifes Kebudayaan, manifestan tidak menggunakan kata Nasakom sekalipun sebagai dasar pemikirannya. D. N. Aidit mengungkapkan bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Manifes Kebudayaan memang tidak menyetujui Nasakom. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Tetapi mereka tetap berkepala batu tidak menjatakan persetudjuannya pada Nasakom. Padahal persoalannya sederhana sekali: "Setudju Pantjasila harus setudju Nasakom". Pantjasila dan Manipol tanpa Nasakom adalah bagaikan kendaraan bermotor tanpa bahan bakar, alias tidak ada gunanya, ketjuali hanja untuk ditonton dan dikagumi. Pantjasila

²¹ Artikel ini berjudul "Waspada! Waspada!" yang dimuat dalam *Sastra dan Budaja*. Namun di dalam artikel ini tidak dimuat keterangan tanggal pembuatan. Artikel ini dapat dilihat di Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin.

dan Manipol tanpa Nasakom adalah abstrak dan munafik, penipuan dan pemalsuan.

Dikatakannya selanjutnya bahwa manikebu adalah usaha kasar untuk mengebiri revolusi, untuk menggagalkan revolusi dengan merangkul musuh revolusi dan menjepak kawan2 revolusi. Pernyataan kaum Manikebu sebagai "pendukung Manipol" dengan tanpa menyetujui Nasakom hanya mengungkapkan kemunafikan mereka.²²

Dari kutipan di atas terlihat bahwa D. N. Aidit menganggap walaupun Manifes Kebudayaan menggunakan Pancasila sebagai falsafah kebudayaannya, tetapi tanpa menggunakan Nasakom pun tak akan ada gunanya. Bahkan lebih lanjut lagi dikatakan bahwa mengakui Pancasila dan Manipol tanpa adanya pengakuan terhadap Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) adalah munafik dan merupakan penipuan serta pemalsuan. Oleh karena itu, D. N. Aidit berkesimpulan bahwa manifes Kebudayaan berwatak kontrarevolusi karena mencoba mengebiri revolusi dengan merangkul musuh-musuh dan mengkhianati kawan-kawannya.

4.2.1.6 Manifes Kebudayaan Bersikap Ragu-ragu terhadap Revolusi

Serangan yang dilancarkan Lekra lainnya yaitu anggapan bahwa Manifes Kebudayaan bersikap ragu-ragu terhadap revolusi. Tentunya hal ini dianggap akan melemahkan jalannya revolusi. Anggapan ini tampaknya muncul dari pernyataan manifestan dalam naskah Manifes Kebudayaan yang menyatakan tidak "memperdewakan revolusi", tetapi juga tidak "mempersetankan" revolusi. Pernyataan inilah yang kemudian diserang oleh Lekra sebagai sebuah pernyataan yang menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Dengarlah apa yang kemudian mereka katakan: "... Kami tidak memperdewakan Revolusi karena kami tidak mempunyai pengabdian palsu. Sebaliknya kami tidak pula mempersetankan revolusi karena kami

²² "Menko/Wk. Ketua MPRS & Ketua CC PKI D.N. Aidit: Manikebu Adalah Usaha Kasar untuk Mengebiri Revolusi," *Bintang Timur*, 22 Maret, 1964.

tidak pula mempunyai pengabdian palsu. Tetapi kami adalah revolusioner....”.

Djadi apakah artikata revolusioner menurut mereka ini? Jaitu jang sikapnja setengah2: tidak bentji tapi djuga tidak mendewakan revolusi. Didalam kehidupan; separo tambah separo itu tak pernah mendjadi satu. Ia selamanja mendjadi nol. Lebih2 dalam sikap orang terhadap revolusi!²³

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Lekra umumnya mencoba untuk mempertentangkan gagasan-gagasan Manifes Kebudayaan dengan ajaran Presiden Soekarno. Adanya usaha untuk mempertentangkan Manifes Kebudayaan membuat Manifes Kebudayaan seolah diciptakan untuk melawan ajaran Soekarno. Mempertentangkan Soekarno dengan Manifes Kebudayaan tentunya menjadi tujuan Lekra agar Presiden Soekarno melarang Manifes Kebudayaan.

4. 2. 2 Penyerangan terhadap Pribadi Manifestan

Dari serangan-serangan yang dilancarkan Lekra dan kawan-kawannya, tampaknya serangan terhadap pribadi pendukungnya justru paling gencar dilakukan daripada penyerangan terhadap ideologi yang diusung para manifestan. Hal ini memperlihatkan bahwa pada masa itu perdebatan ideologi menunjukkan adanya penyerangan, tetapi penyerangan tersebut sifatnya menjadi subjektif karena yang diserang atau dikritik lebih banyak individu atau pribadi orang tersebut daripada pemikirannya atau ideologinya.

Serangan yang paling sering dilontarkan kepada para manifestan yaitu bahwa manifestan dianggap munafik. D. N. Aidit merupakan salah satu orang yang dengan keras menyatakan hal tersebut. Ia menganggap para manifestan munafik karena para manifestan dalam naskah Manifes Kebudayaan mengaku sebagai revolusioner, tetapi tidak menyebutkan Nasakom. Hal ini membuat D. N. Aidit menganggap bahwa mereka sebenarnya adalah munafik. Mereka menggunakan kata “revolusi” dan menyatakan dirinya revolusioner sebagai usaha untuk menipu rakyat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

²³ “Manikebu Mau Tandingi Manipol!”, *Suluh Indonesia*, 20 Maret 1964.

Manipol sebagai program perjuangannya Indonesia telah menetapkan strategi umum revolusi Indonesia dan karena strategi umum itu didasarkan pada suatu analisa yang tepat mengenai masyarakat Indonesia, maka Manipol adalah objektif, adalah ilmiah. Namun ia menjerukan, masih ada saja orang2 yang mengaku “revolusioner” tapi harus diganjang lebih dulu baru mau “menerima” Manipol, dan tetap berkepala batu tidak mau menerima Nasakom. Inilah tampaknya orang2 revolusioner munafik manipol, yang berusaha menipu Rakyat dengan kata2 “revolusi” tanpa Manipol. Usaha itu tidak lain daripada usaha untuk memukul revolusi dengan kata “revolusioner”.²⁴

Lekra dan kawan-kawannya juga menganggap bahwa manifestan walaupun dalam naskah Manifest Kebudayaan menyatakan revolusioner, pada kenyataannya mereka tidak berwatak revolusioner. Hal ini dibuktikan Lekra dengan menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan dan hasil karya manifestan tidak ada yang bercorak antikolonial dan antiimperialisme. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa manifestan berwatak kontrarevolusioner karena menganggap karya-karya yang berpihak pada seni untuk rakyat sebagai sebuah pengabdian yang palsu. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Tetapi sudahkah atau akankah para penandatangan MANIFES itu sendiri konsekwen terhadap pernyataan2 mereka? Kenyataan2 sejarah sudah dan akan terus mengudji mereka. Djauh dari kenyataan2 revolusioner yang menjadi watak perjuangan nasional kita. Para penandatangan MANIFES tsb tidaklah pernah tampil dgn pernyataan2, apalagi kreasi2 yang bertjorak anti kolonialis, imperialisme. Sebaliknya dari kreasi2 yang berbau pembelaan terhadap kaum buruh dan tani kreasi2 yang berbau kerinduan kepada perdamaian sejati sampaipun kreasi2 yang bertjorak anti kolonialisme-imperialisme dan feodalisme, mereka anggap sebagai “pengabdian palsu” terhadap kemanusiaan atau sebagai “pendewasaan terhadap revolusi”, fetisjisme dsb.²⁵

Sitor Situmorang juga menyerang pribadi manifestan dengan menyatakan bahwa pihak pendukung Manifest Kebudayaan telah menerima uang suap dari Amerika Serikat sebagai pondasi untuk menjegal arus revolusi di Indonesia. Hal

²⁴ *Ibid.*

²⁵ “Waspada! Waspada!”, *Sastra dan Budaya*, artikel yang terdapat di Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin.

ini juga dilontarkan Pramoedya Ananta Toer bahwa para pendukung Manifes Kebudayaan menerima uang dari Amerika untuk mengkhianati Soekarno.

Serangan terhadap pribadi manifestan lebih keras lagi dilontarkan oleh Lekra dengan menyatakan bahwa pendukung Manifes Kebudayaan, seperti Wiratmo Soekito, Trisno Sumardjo, dan Bokor Hutasuhut merupakan sebodoh-bodohnya pengarang. Hal ini diungkapkannya karena para pendukung Manifes Kebudayaan kelihatan sekali mempunyai tekad buruk terhadap Manifesto Politik yang bergerak dalam bidang kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

“Duta Masyarakat” dalam induk karangannya kemarin itu menulis bahwa “setolol2 pengarang mestilah bisa menjembunikan tekadnja jang buruk, andaikata dia terlintas dihatinja”. Tapi pendukung2 “Manikebu” seperti Wiratmo Sukito, Trisno Sumardjo, Bokor Hutasuhut dll, ternyata tidak bisa “Menjembunikan tekadnja jang buruk”, mungkin karena mereka tak tahu lagi menahan nafsu berada dalam posisi jg semakin terpepet oleh ofensif Manipolis dibidang kebudajaan selama ini, mungkin pula karena memang sedikit kurang daripada “setolol2 pengarang”.²⁶

Manifestan yang paling banyak mendapat serangan dari Lekra yaitu Wiratmo Soekito. Wiratmo Soekito, sebagai konseptor Manifes Kebudayaan, dianggap sebagai dalang Manifes Kebudayaan. Oleh karena itu, Lekra dan kawan-kawannya begitu gencar “mengganyang” Wiratmo Soekito.

Dalam *Bintang Timur*, Lekra mempertanyakan Wiratmo Soekito yang dalam naskah Manifes kebudayaan mencoba mengusung budi nurani universal. Lekra menggugat Wiratmo Soekito yang mengusung budi nurani universal, tetapi dirinya sendiri tidak mempunyai budi nurani. Lekra menganggap Wiratmo Soekito sebagai seseorang yang tidak mempunyai budi nurani sebagai anak bangsa, rakyat Indonesia, dan hamba Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Bung Pram. Untunglah Oom Wir memberi aku beberapa ungkapan jang bisa diungkap seperti empok Mirah membalik kue srabi dalam penggorengannya. Dalam pendjelasannya itu dia nangkring pada ranting jang dinamainja ”budinurani universal” dan ”memantjarkan Sinar Tjahaja Illahi”. Semua berkisar disini. Rupa2nja mata-hidjau paman Wir itu sudah

²⁶ “Kaum ‘Manikebu’ Terpentjil,” *Harian Rakjat*, 6 Maret, 1964.

memantjarkan sinar tjahaja Illahi kiranja. Tapi tak mengapalah, itu visiun pribadi, biarlah dia kantong sendiri sebagai kuku matjan buat hiasan arlodjinja. Tapi tentang budinurani universil itu! Lha dimana budinuraninja sebagai bangsa (nasionalis) atau dimana pula budinuraninja sebagai rakjat Indonesia (sosialis)? Dimana pula budinuraninja sebagai hamba Allah jang berhutang budi pada tanah airnja (agama) dan Tuhan? Djadi makin djelas, budinurani universil ini djuga sebuah manifes dari budinurani anti Nasakom.²⁷

Bahkan lebih lanjut Lekra dengan nada yang begitu keras dan menggunakan bahasa yang kasar di dalam *Bintang Timur* dengan judul yang mengejek, yaitu “Dasar Manikebu Lu!” menyuruh Wiratmo Soekito untuk bunuh diri. Lekra menyuruh Wiratmo, konseptor Manifes Kebudayaan untuk bunuh diri karena tidak ada pembelaan dari para manifestan lain ketika Wiratmo Soekito terus-menerus diserang oleh Lekra dan kawan-kawannya. Hal ini dapat kita lihat dari kutipan berikut

Mana jang ribuan ribuan dan djutaan itu? Kok tak ada satu simpatipun pada paman Wir? Kalau paman Wir ingat pada suatu masa sekembalinja dari Eropa jang pertama kali dulu, tentu dia ingat apa jang dia propagandakan: “penjelesaian jang terbaik adalah bunuh diri!”. Ingat, paman Wir! Ajohlah, bunuh diri sadja kalau setia pada propaganda sendiri.²⁸

Dari kutipan di atas dapat terlihat bahwa Lekra menyindir Wiratmo Soekito yang pernah mengatakan bahwa pendukung Manifes Kebudayaan telah ada ribuan. Memang benar, di dalam *Berita Republik* pada bulan Februari, Wiratmo Soekito pernah mengatakan bahwa Manifes Kebudayaan mempunyai 35 organisasi dan 5000 perseorangan.²⁹ Namun dari kutipan di atas tampaknya Lekra memakai gaya bahasa hiperbola dengan menyebut dukungan Manifes dengan jumlah ribuan dan jutaan. Lekra mempertanyakan mengapa dari jumlah yang cukup besar tersebut tidak ada seorang pun yang membela Wiratmo Soekito.

Hal ini tampaknya berkaitan dengan posisi Manifes Kebudayaan pada masa itu. Saat itu, Manifes Kebudayaan begitu gencar mendapat serangan dari

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ “Pendukung2 Manifes Kebudajaan Setudju Statement LKN Pusat,” *Berita Republik*, Februari, 1964.

Lekra dan kawan-kawannya. Para pendukungnya terus-menerus mendapat tekanan. Media massa pun tidak luput dari tekanan Lekra dan kawan-kawannya. Oleh karena itu, menjadi begitu sulit bagi manifestan untuk menyatakan pendapatnya atau membela Wiratmo Soekito.

Dari bahasa yang digunakan dalam menyerang lawan-lawannya yang dalam hal ini adalah Manifes Kebudayaan, Lekra tampaknya tidak lagi menggunakan kata-kata yang tanpa emosi. Kalimat-kalimat yang teruntai seringkali terlihat bernada kasar dan provokatif. Bahkan tidak jarang terdengar hanya seperti kalimat-kalimat caci-maki. Pilihan kata-kata yang dipakai seperti kata “ganyang”, “babat”, “kebiri”, dan “gasak” berkonotasi buruk. Hal ini pernah dikritik oleh manifestan bahwa sebagai budayawan tidak sepatasnya menggunakan bahasa yang seperti itu dalam menulis serangannya di media massa. Hal ini dapat dilihat dari kutipan artikel berikut

Lantas dia bilang lagi “bagaimana mungkin kita bisa membangun suatu kesenian, kebudajaan jang baik dan murni, jang halus dan berbudi, kalau bahasa jang kita gunakan begitu keras dan maki2?” Ini jang namanja H.U., tahu? Humanisme Universal alias Honger Udin (politik). Halus dan berbudi sih, boleh sadja, suatu keharusan malah, tapi buat siapa? Buat kawan, bukan lawan. Pendeknja: ganjang sadja manikebu berbulu soska itu, ganjang sadja soska berbulu manikebu, biar dia beladjar rendah hati sedikit. Memangnja minta didjilati?³⁰

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa secara tidak langsung Lekra mengakui bahwa mereka menggunakan bahasa yang kasar dalam melakukan serangan terhadap lawannya. Namun, menurutnya, hal ini adalah wajar jika untuk menghadapi musuhnya atau lawannya. Dari kutipan di atas juga terlihat secara tegas bahwa Lekra menarik garis pemisah yang begitu tegas antara lawan dan kawan. Sementara itu, Manifes Kebudayaan dianggap mereka sebagai lawan yang harus “diganyang”. Oleh karena itu mereka merasa wajar jika menggunakan kata-kata kasar ketika melakukan penyerangan terhadap Manifes Kebudayaan.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa Lekra dan kawan-kawannya begitu ofensif dalam menyerang Manifes Kebudayaan. Serangan yang dilakukan tidak hanya mengkritik ideologi yang dianutnya, tetapi pribadi para manifestan pun

³⁰ “Dasar Manikebu Lu!”, *Bintang Timur*, 22 Maret, 1964.

tidak luput dari serangan mereka. Bahkan, para organisasi kebudayaan yang menolak Manifes Kebudayaan dan mencoba “mengganyang” Manifes Kebudayaan juga diberi penghargaan. Hal ini dapat diketahui dari artikel yang berjudul “Lekra Beri Penghargaan kepada Lesbumi” yang dimuat dalam *Bintang Timur* tanggal 29 April 1964.³¹ Dalam artikel tersebut diungkapkan bahwa Prof. Bakri Siregar selaku ketua pengurus pusat lembaga memberikan penghargaan kepada Lesbumi. Bukan hanya Lesbumi saja, ia juga memberikan penghargaan kepada organisasi dan tokoh lainnya seperti LKN, Lesbi, Okra, Lektur, Menteri PD dan K, Prijono dan Rektor UI, Kol. Dr. Sjarif Tajib yang juga tidak menyetujui Manifes Kebudayaan.

Tampaknya pemberian penghargaan terhadap organisasi dan individu yang menolak Manifes Kebudayaan tersebut merupakan salah satu taktik Lekra menggalang dukungan. Taktik ini merupakan salah satu upaya Lekra untuk mengajak organisasi dan individu lainnya juga ikut menolak Manifes Kebudayaan.

4.3 Tanggapan Manifestan terhadap Reaksi Kontra-Manifes Kebudayaan

Para manifestan tampaknya telah menyadari bahwa Manifes kebudayaan yang disahkan pada 17 Agustus 1963 ini akan mendapat reaksi yang besar, terutama reaksi yang datang dari pihak kontra-Manifes Kebudayaan. Para manifestan ini dalam menghadapi serangan yang datang bertubi-tubi tersebut tidaklah hanya bersikap diam. Mereka berusaha untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas kritikan yang dilemparkan oleh Lekra dan kawan-kawannya walaupun media yang digunakan begitu terbatas.

Memang tanggapan yang diberikan manifestan terhadap reaksi kontra-Manifes Kebudayaan tidaklah seimbang dengan serangan-serangan yang dilakukan Lekra dan kawan-kawannya. Hal ini disebabkan Manifes Kebudayaan tidak menguasai banyak media yang dapat dipakai sebagai corong mereka. Media massa pada masa itu umumnya dikuasai Lekra dan kawan-kawannya. Oleh karena

³¹ “Bersama Mengganjang ‘Manikebuisme’: Lekra Beri Penghargaan kepada Lesbumi,” *Bintang Timur*, 29 April, 1964, hlm. 1.

itu, manifestan merasa sulit untuk mengemukakan pembelaannya terhadap Manifes Kebudayaan. Baru setelah Lekra jatuh, para manifestan mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaannya.

Media yang digunakan untuk menyampaikan tanggapan manifestan terhadap serangan yang dilakukan oleh Lekra dan kawan-kawannya di antaranya adalah *Sastra* dan *Berita Republik*. Selain itu, para manifestan ternyata juga membentuk sebuah tim khusus yang berfungsi untuk menyelidiki serangan-serangan yang dilakukan oleh Lekra dan kawan-kawannya. Kelompok ini menamakan dirinya sebagai *team research* Manifes Kebudayaan.

Tim tersebut bertujuan untuk mempelajari serangan-serangan yang dilakukan oleh "kaum manifes phobis". Para manifestan menamai orang-orang yang menyerang Manifes Kebudayaan sebagai manifes-phobis. Hal ini tampaknya terilhami dari anggapan manifestan bahwa orang-orang atau organisasi menyerang Manifes Kebudayaan karena rasa takut dan terancam keberadaannya. Namun sayangnya, hasil penelitian tersebut tidak dapat dimuat di media massa karena mendapat berbagai penolakan. Para manifestan mengungkapkan bahwa pada saat itu berbagai surat kabar menolak untuk mempublikasikan hasil penelitian tersebut karena mendapat tekanan dari Lekra dan kawan-kawannya. Hasil penelitian ini baru dapat dipublikasikan setelah PKI dan Lekra dilarang di Indonesia.

Ada beberapa hal yang dicoba untuk diluruskan oleh manifestan. Salah satunya yaitu masalah humanisme universal yang dituduh membela kepentingan kaum kapitalis. Kaum manifestan menganggap bahwa humanisme universal sama sekali tidak membela kaum kapitalis. Tidak ada alasan yang membuat humanisme universal dituduh membela kaum kapitalis, bahkan lebih lanjut Manifes mengemukakan bahwa humanisme universal sebenarnya seirama dengan Pancasila.³² Hal ini disebabkan, menurut mereka, jiwa humanisme universal dapat ditemukan di dalam Pancasila. Oleh karena itu, dengan tegas mereka menolak pernyataan yang mengatakan bahwa humanisme universal bermaksud membela kepentingan kaum kapitalis.

Pembelaan juga dilakukan manifestan terhadap opini-opini yang menyatakan manifestan anti-Manifesto Politik. Manifestan menanggapi

³² A. Wahid Situmeang, "Humanisme Universal Seirama dengan Pancasila," *Berita Republik* *Budaja*.

pernyataan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), A. Karim D. P., yang mengatakan bahwa Manifes Kebudayaan ingin menandingi Manifesto Politik. Menurut manifestan, tuduhan tersebut kurang beralasan jika menyebut Manifes Kebudayaan ingin menandingi Manifes Politik hanya karena mereka juga sama memakai kata "manifes". Manifestan menyatakan bahwa tuduhan yang menganggap Manifes Kebudayaan sebagai tandingan Manifesto Politik berarti tidak memahami Manifesto Politik sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Djadi, manipol bukanlah kekuasaan, melainkan Tjita Mulia, jaitu Budi Nurani Universil. Maka djelaslah disini bahwa dengan tjita2nja tentang keseimbangan antara kebudajaan dan kekuasaan itu Manifes sama sekali tidaklah bermaksud "menandingi" Manipol. Barang siapa jang beranggapan bahwa Manifes adalah "Manipol tandingan" maka atau ia itu tidak memahami Manifes, atau ia itu tidak memahami Manipol.³³

Serangan yang menyatakan bahwa Manifes Kebudayaan anti-Manipol atau memusuhi Nasakom juga ditolak oleh para manifestan. Penolakan ini disampaikan di *Abad Muslimin* dengan artikel yang berjudul "Manifes Kebudayaan dan Manifes—Phobi".³⁴ Manifes menjelaskan bahwa di bagian penjelasan Manifes Kebudayaan, manifestan menyatakan bahwa musuh mereka bukanlah manusia, melainkan unsur-unsur yang membelenggu manusia tersebut. Unsur-unsur yang membelenggunya ini dimaksudkan manifestan seperti sifat imperialisme, kolonialis, dan juga neokolonialis. Jadi, pernyataan yang menganggap bahwa Manifes Kebudayaan anti-Nasakom dan memusuhi Nasakom juga ditolak oleh manifestan.

Para manifestan juga mengatakan bahwa mereka tidak menganggap setiap orang yang menolak Manifes Kebudayaan merupakan lawan mereka. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Oleh karena itulah kami membedakan lawan jang prinsipiell, dari lawan jang non-prinsipiell. Bukan setiap orang jang menolak Manifes adalah lawan kami, karena kami tahu bahwa mereka itu menolak karena

³³ Tim *Research* Manifes Kebudayaan. "Manifes-phobi, Motif, dan Targetnja". Tulisan yang terdapat di Puast Dokumentasi sastra H. B. Jassin, hlm. 13.

³⁴ *Ibid*, hlm. 14.

dibelenggu, gertakan dan antjaman itu. Dan kami tahu bahwa belenggu, gertakan dan antjaman itu berasal dari orang2 asing jang berkepentingan ditanahair kami.³⁵

Para manifestan juga menjawab tuduhan dari Lekra dan kawan-kawannya seperti pernyataan dari Bakrie Siregar yang dimuat dalam *Bintang Timur*, 3 April 1964, bahwa Manifes Kebudayaan mempunyai tujuan untuk menghancurkan revolusi dengan cara melupakan perjuangan dan menghilangkan garis pemisah antara kawan dan lawan. Hal ini dengan tegas ditolak oleh manifestan. Manifestan membuktikan hal tersebut dengan mengutip pernyataan yang ada di dalam naskah Manifes Kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Benarkah pula bahwa Manifes "mengaburkan" batas antara kawan dan lawan? Memang "benar", menurut dongengan mereka!! Tetapi batjalah Manifes baik-baik, dan teliti: "Kami tetap menarik garis pemisah setjara tegas antara musuh2 dan sekutu2 Revolusi, musuh2 dan sekutu2 Kebudajaan, tetapi ini tidak berarti bahwa kami mempunjai sikap jang demikian itu adalah djustru mengaburkan garis pemisah tersebut." Oponen2 kami menuduh seolah-olah kami mengaburkan garis pemisah itu, karena kami membela dalil bahwa setiap daja kreatif adalah revolusioner.³⁶

Dari kutipan di atas terlihat jelas bahwa Manifes Kebudayaan tidaklah merupakan usaha untuk menghilangkan garis pemisah antara lawan dan kawan. Manifes Kebudayaan menyatakan bahwa manifestan secara tegas memberi garis pemisah antara musuh-musuh revolusi.

Manifestan juga mengatakan bahwa mereka menolak tuduhan anti-Nasakom yang diberikan Lekra dan kawan-kawannya. Menurut manifestan, tuduhan seakan-akan Manifes Kebudayaan memusuhi Nasakom hanya karena tidak ada tokoh komunis yang mendukungnya, seperti yang dinyatakan oleh A. S. Dharta, merupakan tuduhan yang tidak beralasan. Manifestan melihat tampaknya Lekra dan kawan-kawannya mencoba menggunakan julukan "memusuhi Nasakom" untuk menghancurkan Manifes Kebudayaan.

Lekra juga menyerang Manifes Kebudayaan sebagai anti-Nasakom karena Manifes Kebudayaan tidak menyebut kata "Nasakom" satu patah kata pun. Hal ini

³⁵ *Ibid*, hlm. 15.

³⁶ *Ibid*, hlm. 8.

kemudian dijawab oleh Wiratmo Soekito yang merupakan konseptor Manifes Kebudayaan. Wiratmo Soekito memang mengakui bahwa di dalam penjelasan naskah Manifes Kebudayaan tidak terdapat kata Nasakom. Namun, bukan berarti mereka memusuhi Nasakom. Manifestan mengakui bahwa mereka tidak menyembah aksara. Jadi, walaupun kata Nasakom tidak ada di dalam naskah Manifes Kebudayaan, naskah tersebut mengandung jiwa Nasakom. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Oleh Wiratmo Soekito dikemukakan selanjutnya, bahwa Manifes Kebudayaan bagian Pendjelasan tidak setjara harfiah menjebut Nasakom disebabkan oleh karena Manifes tidak menjembah aksara sepeti jang sering dilakukan oleh Pramudya Ananta Toer sendiri. Revolusi tidak hendak menjembah aksara, tetapi bagi mereka jang tidak melihat Nasakom dalam Manifes dapatlah diterangkan bahwa kalimat jang tertjantum dalam Pendjelasan Manifes, "Kebudajaan Nasakom melainkan merupakan perdjoangan Nasional dari suatu bangsa sebagai totalitas dalam menjempurnakan kondisi2 hidup Nasionalnja". Demikian Wiratmo jang menandakan bahwa dalam perkembangannja pada tingkat sekarang Nasakom djanganlah diartikan monopoli partai2 politik, melainkan merupakan samenbundeling van alle repolutionaire krachten, sehingga tidak terbatas kepada karyawan politik sadja, melainkan meluas kepada karjawan2 budaja, karjawan2 militer dsbnja dalam integrasi dengan Revolusi Indonesia.³⁷

Tidak hanya menanggapi serangan yang dilemparkan Lekra dan kawan-kawannya, para manifestan juga melakukan serangan balik terhadap orang-orang tersebut. Para manifestan menganggap bahwa orang-orang yang menentang Manifes Kebudayaan berarti juga menentang Presiden Soekarno. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Djadi tjiri kepribadian adalah perkembangan, karena Kepribadian jang tidak berkembang adalah abnormal, adalah sakit, dan karenanja haruslah dikembalikan kepada keadaan jang normal, haruslah disembuhkan kembali. Demikianlah halnja suatu bangsa akan merupakan suatu Kepribadian jang abnormal, apabila tertindas dalam pendjajahan umpamanja. Normalisasi Kepribadian Nasional mutlak menuntut Freedom to be free. Inilah jang merupakan intisari Manifes Kebudayaan! Dan oleh karena itu barangsiapa jang menentang kata-kata Bung Karno sebagai

³⁷ "Wiratmo Sukito Mendjawab Keterangan P. Ananta Toer," *Amar Makmur*, 28 Januari, 1964, hlm. 11.

berikut: "Dan mereka takut mereka akan kenaikan kekuatan2 jang baru muntjul itu mereka mentjoba mengendalikan arah dan politik negara2 jang baru merdeka. Mereka mentjoba menahan negara2 itu didalam orbit mereka sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Dan dengan tjara ini dan untuk maksud2 ini mereka tjampurtangan dalam urusan2 jang bukan lagi urusan2 mereka. Banjak tjontoh2 jang kita lihat—dimanakah hal ini berachir?"³⁸

Berbeda dengan Lekra yang menggunakan kata-kata kasar untuk mencaci-maki lawan-lawannya, Manifes Kebudayaan menggunakan bahasa yang halus tetapi dalam maknanya dan mengena di hati yang menunjukkan sifat humanis mereka. Manifestan mengatakan bahwa orang-orang Lekra dan kawan-kawannya sebagai seorang yang tersesat. Mereka dianggap tersesat di jalan yang bertentangan dengan Pancasila dan Manifesto Politik USDEK. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Kami bertanja: apakah bagian terbesar dari mereka jang menolak Manifes itu telah mempeladjar baik2 Manifes? Apakah mereka itu djustru terjebak dan tersesat itu kami hanja bisa berkata "Tuhan, ampunilah mereka itu, karena mereka tak tahu apa jang mereka lakukan!" Atau dengan gaja "Renmin Ribao" dan "Honggi" kami hanja bisa berkata: "Kami ingin menasihatkan kawan Iramani dengan sepatah kata dari hati jang tulus-ichlas, kami harap kau akan kembali dari djalan jang sesat, kembali kedjalan Pantjasila dan Manipol-Usdek dari djalanmu jang salah sama sekali itu."³⁹

Manifestan juga menyatakan Lekra-lah yang sebenarnya bersifat hipokrit atau munafik. Orang-orang Lekra merupakan orang-orang yang anti-Manipol. Manifestan menganggap bahwa Lekra dan kawan-kawannya pura-pura menerima Manipol untuk kepentingan mereka, yaitu agar tidak dianggap kontarevolusi.

Dari serangan2 kaum reaksi jang membuat persekutuan Manifes-phobi itu kami semakin yakin akan kesimpulan kami sebelum Manifes dilahirkan. Jaitu bahwa persekutuan kaum reaksi itulah jang ketika Manipol diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1959 paling dulu anti-Manipol. Untuk menjembunjikan sikapnja itu mereka pura2 menerima

³⁸ Tim *Research* Manifes Kebudayaan, "Manifes-phobi, Motif, dan Targetnja," Tulisan yang terdapat di Pusat Dokumentasi sastra H. B. Jassin, hlm. 14.

³⁹ *Ibid*, hlm. 8.

Manipol, dan supaja hipokrisinja itu tidak kelihatan maka mereka kupas kulitnja, mereka singkirkan isinja, lalu mereka gantikan dengan isi mereka sendiri. Demikianlah mereka selalu mengutip bagian2 jang menguntungkan kepentingan golongan mereka belaka. Umpamanja, mereka mengutip: "Kaum Buruh dan Tani adalah sokoguru Revolusi!" itu sadja, seolah2 sokoguru Revolusi hanjalah kaum buruh dan tani, itupun jang dibawah pengaruh mereka.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa bahasa yang digunakan para manifestan bukanlah bahasa yang kasar. Walaupun Lekra menggunakan pilihan-pilihan kata yang berkonotasi kasar, Manifes Kebudayaan tidak membalas dengan cara seperti itu. Hal ini memperlihatkan kehumanisan para manifestan. Selain itu, tampaknya hal ini juga terkait pada kedudukan Manifes Kebudayaan pada masa itu yang minoritas. Kedudukan Lekra yang menguasai bidang kebudayaan membuat mereka berbicara dengan bahasa yang bebas tanpa ketakutan terhadap sesuatu. Sementara itu, kedudukan Manifes Kebudayaan yang kurang menguntungkan membuat mereka menyatakan pendapatnya secara lebih hati-hati untuk menghindari serangan yang lebih besar.

Manifes Kebudayaan juga kembali menyerang balik Lekra dengan menyebut Lekra anti-Manipol. Hal ini tampaknya memperlihatkan bahwa kedua golongan tersebut mencoba mempertentangkan ideologi lawannya dengan ajaran Presiden Soekarno. Mereka berlomba-lomba mencari dukungan dari Soekarno dengan mencoba mengungkapkan bahwa mereka mendukung ajaran-ajarannya, seperti Manipol-USDEK. Mereka juga saling menuduh lawannya sebagai anti-Manipol agar Soekarno memusuhi dan akhirnya melarangnya.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 9.

BAB 5

PELARANG MANIFES KEBUDAYAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP SITUASI KEPENGARANGAN KESUSASTRAAN INDONESIA

Manifes Kebudayaan merupakan sebuah pernyataan cita-cita yang lahir sebagai reaksi atas Lekra. Sebagai sebuah reaksi, tentunya Manifes Kebudayaan mendapat tanggapan dari pihak yang dituju, yaitu Lekra dan kawan-kawannya. Reaksi tersebut sudah diulas dalam bab empat. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa Lekra bereaksi keras terhadap Manifes Kebudayaan.

Berbagai tuduhan dilancarkan oleh Lekra terhadap para pendukung Manifes Kebudayaan. Julukan sebagai kontrarevolusioner, individualis, kebarat-baratan, anti-Manipol, anti-Nasakom ataupun lainnya dilekatkan dan kemudian disebarluaskan oleh Lekra dan kawan-kawannya kepada para manifestan. Serangan pun tak henti-hentinya dilakukan Lekra untuk melumpuhkan manifestan. Akhirnya, 8 Mei 1964 merupakan puncak pencapaian Lekra atas serangannya selama ini terhadap manifestan. Pada hari itu, Presiden Soekarno melarang Manifes Kebudayaan karena dianggap Manifes Kebudayaan dianggap menandingi Manifesto Politik dan melemahkan revolusi.

Pelarangan Manifes Kebudayaan ini tentunya berpengaruh terhadap situasi kepengarangan kesusastraan Indonesia. Kebebasan kreatif yang menjadi cita-cita para manifestan akhirnya gagal untuk diwujudkan pada masa itu. Hal ini membuktikan bahwa politik memang telah menjadi panglima.

Dilarangnya Manifes Kebudayaan membuat Lekra dan kawan-kawannya semakin leluasa untuk bergerak di bidang kesenian dan kesusastraan. Para penanda tangan dan pendukung Manifes Kebudayaan berhasil "diganyang". Kesusastraan Indonesia pun akhirnya diwarnai oleh karya-karya sastrawan Lekra. Karya-karya tersebut bernafaskan revolusioner dan terus-menerus berbicara tentang rakyat. Rakyat yang dimaksud dalam hal ini adalah buruh dan petani yang telah menjadi soko guru PKI. Sajak-sajak alam dan keagamaan begitu sulit untuk ditemui. Hal ini memperlihatkan bahwa kebebasan mencipta dan berkreasi dalam kesusastraan Indonesia dikalahkan atas nama kepentingan politik. Pelarangan

Manifes dan pengaruhnya terhadap kesusastraan Indonesia inilah yang akan dibahas dalam bab ini.

5.1 Pelarangan Manifes Kebudayaan

Setelah aksi "pengganyangan" dan "pembabatan" oleh Lekra dan kawan-kawannya terhadap Manifes Kebudayaan terus-menerus dilancarkan, akhirnya pada 8 Mei 1964, Manifes Kebudayaan dilarang. Pelarangan ini dilakukan oleh Presiden Soekarno. Menurut pernyataan Presiden Soekarno, Manifes Kebudayaan dilarang karena sudah ada Manifesto Politik yang juga harus ditaati sebagai haluan politik kebudayaan negara. Oleh karena itu, keberadaan Manifes Kebudayaan dianggap sengaja dibentuk untuk menandingi Manifesto Politik atau dikenal dengan Manipol. Hal ini tentu saja dianggap akan melemahkan revolusi. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

"Kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Pemimpin Besar Revolusi, dengan ini menyatakan bahwa demi keutuhan dan kelurusan jalannya Revolusi, dan demi kesempurnaan ketahanan bangsa, apa yang disebut 'Manifesto Kebudayaan' yang disingkat menjadi Manikebu dilarang.

Sebab larangan itu ialah karena Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai pancaran telah menjadi garis besar haluan negara dan tidak mungkin didamping dengan Manifesto lain, apalagi kalau Manifesto lain itu menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap Revolusi dan memberikan kesan berdiri di sampingnya, padahal demi suksesnya Revolusi maka segala usaha kita, juga dalam lapangan kebudayaan, harus kita jalankan di atas rel Revolusi menurut petunjuk-petunjuk Manipol dan bahan Indoktrinasi lain-lainnya."¹

Dari pernyataan Presiden Soekarno di atas terlihat bahwa Presiden Soekarno menyatakan Manifes kebudayaan terlarang karena dianggap menandingi Manifesto Politik dan menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Sikap tersebut dianggap Presiden Soekarno akan melemahkan jalannya revolusi Indonesia. Dari alasan-alasan yang dikemukakan, tampaknya dapat dilihat bahwa alasan-alasan tersebut sama dengan tuduhan-tuduhan yang telah dilancarkan

¹ "Presiden Njatakan 'Manifesto Kebudayaan' Terlarang," *Sinar Harapan*, 11 Mei, 1964.

Lekra sebelum-sebelumnya. Pada bab empat kita dapat melihat bagaimana Lekra secara ofensif menyerang Manifes Kebudayaan dengan menuduh bahwa Manifes kebudayaan kontrarevolusioner dan anti-Manipol. Pelarangan Manifes kebudayaan oleh Presiden Soekarno menunjukkan bahwa usaha Lekra untuk melumpuhkan Manifes Kebudayaan berhasil.

Sebenarnya, sebelum dikeluarkannya pelarangan Manifes Kebudayaan oleh Presiden Soekarno, para penanda tangan Manifes Kebudayaan dipanggil untuk diperiksa oleh pejabat-pejabat intel dari DPKN, MPPR, SAB, Sekretariat Negara dan Cakrabirawa. Mereka dipanggil untuk diperiksa terkait dengan masalah Manifes Kebudayaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Manifes Kebudayaan dinyatakan membahayakan negara. Oleh karena itu, Presiden Soekarno memutuskan bahwa Manifes Kebudayaan terlarang.

Pernyataan Presiden Soekarno tentang pelarangan Manifes Kebudayaan tersebut kemudian disebarluaskan melalui harian *Antara* dan disiarkan oleh RRI pada tanggal 10 Mei 1964. Hal ini tentunya mengagetkan beberapa pendukung Manifes Kebudayaan. Oleh karena itu, setelah pelarangan Manifes kebudayaan dikeluarkan secara resmi oleh Presiden Soekarno, pada malam harinya beberapa pendukung Manifes Kebudayaan mengadakan pertemuan di Jakarta untuk memperbincangkan masalah tersebut.

Setelah mengadakan perbincangan, para manifestan memutuskan untuk tidak menentang Presiden Soekarno. Hal ini disebabkan bahwa para anggota Manifes Kebudayaan mengetahui Presiden Soekarno hanya mendapat informasi yang salah dari PKI dan para pendukungnya. Selain itu, sikap untuk tidak menentang perintah Soekarno ini tampaknya harus dilakukan para manifestan sebagai satu-satunya "cara aman" bagi mereka pada waktu itu.

Setelah dicapainya keputusan para manifestan untuk mematuhi larangan dari Presiden Soekarno tersebut, keesokan harinya manifestan mengirim surat kawat kepada presiden yang menyatakan bahwa para pendukung Manifes Kebudayaan mematuhi larangan tersebut demi kelangsungan revolusi Indonesia. Para manifestan juga melakukan pembelaan dirinya bahwa mereka membuat Manifes Kebudayaan hanya untuk membantu jalannya revolusi di bidang kebudayaan dan tidak ada maksud lain selain itu. Jadi, mereka tampaknya merasa

begitu keberatan terhadap anggapan Presiden Soekarno bahwa Manifes Kebudayaan ingin menandingi Manifesto Politik. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

“Sesuai dengan larangan PJM Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, BUNG KARNO, terhadap Manifes Kebudayaan demi keutuhan dan kelurusan djalannya Revolusi dan demi kesempurnaan ketahanan Bangsa, maka kami, para pendukung Manifes Kebudayaan dengan ini menjatakan mematuhi larangan tersebut ttk

Kami, didalam mentjetuskan Manifes Kebudayaan tidak ada bermaksud lain selain daripada sebagai karjawan budaja turut membantu Pemerintah merealisasikan Manipol-Usdek dan Ketetapan MPRS dibidang Kebudayaan ttk

Kami tetap setia dibawah pimpinan dan bimbingan Pemimpin Besar Revolusi BUNG KARNO ttkhbs”.²

Surat kawat tersebut diterima Presiden Soekarno tanggal 11 Mei 1964. Selain itu, pernyataan manifestan tersebut juga disiarkan di RRI. Hal ini memperlihatkan bahwa lagi-lagi politik begitu berpengaruh terhadap masalah kebudayaan. Jika kita lihat, Manifes Kebudayaan hanyalah sebuah pernyataan, bukanlah sebuah organisasi. Namun, pernyataan kebudayaan tersebut ternyata disikapi secara politis.

Selain menulis surat kepada Presiden Soekarno, para manifestan yang diwakili oleh H.B. Jassin, Trisno Soemardjo, dan Wiratmo Soekito juga menulis surat kepada para pendukung Manifes Kebudayaan di seluruh Indonesia. Surat tersebut dibuat tanggal 11 Mei 1964, sehari setelah surat kawat kepada Presiden Soekarno dikirim. Surat tersebut berisi imbauan terhadap para pendukung Manifes Kebudayaan untuk mematuhi larangan Presiden Soekarno. Hal ini dapat dilihat dari kutipan surat berikut

Dan berhubung sesuai dengan larangan PJM Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, BUNG KARNO,

² Surat kawat dari H.B. Jassin, Trisno Soemardjo, dan Wiratmo Soekito atas nama pendukung Manifes Kebudayaan kepada Presiden Soekarno tertanggal 10 Mei 1964 dengan tembusan Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III Dr. Chaerul Saleh, Menko/Menpen/Penghubung Masyarakat Dr. Roeslan Abdulgani, Menko/Hankam/Kasab/ Jendral Dr. A.H. Nasution, Menteri PTIP Prof. Ir. Thojib Hadiwidjaja, Menteri PDK Prof. Dr. Prijono, dan M. Nahar. Salinan surat kawat ini terdapat di Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin .

terhadap Manifes kebudayaan tersebut demi keutuhan dan kelurusan djalannya Revolusi dan demi kesempurnaan ketahanan Bangsa, maka kami, para pendukung Manifes Kebudayaan di Djakarta mengandjurkan kepada Saudara2 agar mematuhi/memenuhi maksud daripada larangan tersebut;

Dengan demikian kita tetap setia dibawah pimpinan dan bimbingan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, djustru untuk kepentingan Nasional kita sebagai salah satu golongan jang tetap setia pada Revolusi harus menempatkan kepentingan Nasional diatas kepentingan lainnja.³

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa para penanda tangan atas nama Manifes Kebudayaan mengajak para pendukungnya untuk mematuhi larangan Manifes Kebudayaan yang dinyatakan oleh Soekarno. Mereka mengimbau para pendukung Manifes Kebudayaan untuk tetap setia terhadap Presiden Soekarno. Menurut mereka, hal ini merupakan salah satu pembuktian bahwa mereka merupakan orang-orang yang setia dengan jalannya revolusi.

Setelah peristiwa pelarangan Manifes Kebudayaan tersebut, beberapa organisasi maupun individu yang pada awalnya mendukung Manifes Kebudayaan mulai menyatakan mencabut dukungannya. Berbagai surat yang menyatakan tersebut dikirim ke majalah *Sastra* yang dipimpin oleh H. B. Jassin. Tampaknya, pencabutan dukungan ini menunjukkan pengaruh larangan Manifes Kebudayaan yang cukup besar. Pelarangan Presiden Soekarno terhadap Manifes Kebudayaan tampaknya menciptakan suatu pembuktian bahwa Manifes Kebudayaan melemahkan revolusi dan ingin menandingi Manipol. Oleh karena itu, beberapa individu ataupun organisasi yang awalnya mendukung Manifes Kebudayaan mencabut pernyataan dukungannya karena percaya dengan hal tersebut. Selain itu, pencabutan dukungan terhadap Manifes Kebudayaan tampaknya juga disebabkan adanya tekanan berat terhadap orang-orang atau organisasi pendukung Manifes Kebudayaan. Mereka dicap sebagai orang-orang anti-Manipol dan kontrarevolusioner yang harus dihancurkan. Oleh karena itu, adanya pelarangan tersebut membuat para organisasi dan individu merasa takut untuk tetap setia mendukung Manifes Kebudayaan dan akhirnya beberapa di antaranya memutuskan untuk mencabut dukungannya.

³ Surat dari H.B. Jassin, Trisno Soemardjo, dan Wiratmo Soekito yang mengatasnamakan pendukung Manifes Kebudayaan tertanggal 11 Mei 1964, yang ditujukan kepada pendukung Manifes Kebudayaan. Surat ini terdapat di Pusat Dokumentasi H. B. Jassin.

Setelah pelarangan tersebut, Lekra juga mengumumkan bahwa Manifes Kebudayaan telah mati. Namun, hal ini ditentang keras oleh pendukung Manifes Kebudayaan. Dalam *Sastra*, manifestan menulis sebuah artikel yang berjudul "Manifes Tidak Mati." Tulisan tersebut mengungkapkan bahwa Manifes Kebudayaan tidak akan mati walaupun serangan-serangan untuk menjatuhkan Manifes Kebudayaan datang bertubi-tubi. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

.... Dan setelah segala jalan yang ditempuh itu ternyata sia-sia, terbitlah sebuah dongengan bahwa "Manifes telah mati". Tidak tahulah kita dari manakah datangnya ilham dari dongengan itu yang agaknya mirip dengan ucapan Nietzsche bahwa "Tuhan sudah mati". Tuhan masih hidup dan akan terus hidup. Ini tidak berarti bahwa kita menganggap Manifes itu Tuhan, tetapi Manifes masih hidup dan akan terus hidup pula. Sebab nasib Manifes tidak terletak di tangan resolusi-resolusi dan pernyataan-pernyataan yang didasarkan atas salah informasi, salah interpretasi maupun Manifesphobi. Nasib Manifes pun tidak terletak di tangan Manifes itu sendiri, yang direncanakan namun merencanakan, yang diciptakan namun menciptakan."⁴

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa para manifestan menyatakan dengan tegas bahwa Manifes Kebudayaan tidak akan mati. Para manifestan menegaskan bahwa nasib Manifes Kebudayaan tidak ditentukan oleh "tangan-tangan resolusi-resolusi dan pernyataan-pernyataan yang didasarkan atas salah informasi, salah interpretasi maupun manifesphobi".⁵ Hal tersebut menyiratkan bahwa para manifestan menganggap yang menentukan nasib Manifes Kebudayaan adalah para manifestan sendiri. Pernyataan pelarangan yang dilakukan terhadap Manifes Kebudayaan oleh Presiden Soekarno ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh manifesphobi diakui manifestan tidak berpengaruh terhadap kelangsungan Manifes Kebudayaan.

Tampaknya, walaupun para manifestan mematuhi pelarangan Manifes Kebudayaan, bukan berarti para manifestan mengakui juga bahwa Manifes Kebudayaan mati. Memang jika kita lihat Manifes Kebudayaan tidak mati karena ia memang bukanlah sebuah organisasi. Ia merupakan sebuah pernyataan cita-cita

⁴ "Manifes Tidak Mati," *Sastra* No.2 Tahun IV, 1964.

⁵ *Ibid.*

seniman dan sastrawan. Oleh karena itu, ideologi-ideologi maupun prinsip-prinsip para manifestan yang ada di dalam naskah Manifes Kebudayaan pun akan terus hidup. Walaupun mungkin organisasi-organisasi pendukungnya mati.

5.2 Pengaruh Pelarangan Manifes Kebudayaan terhadap Situasi Kehidupan Kepengarangan Kesusastraan Indonesia

Setelah pelarangan terhadap Manifes Kebudayaan diumumkan oleh Presiden Soekarno secara resmi, serangan terhadap pendukung Manifes Kebudayaan tidak lantas berhenti. Serangan terhadap Manifes Kebudayaan terus-menerus dilancarkan walaupun para pendukung Manifes Kebudayaan telah menyatakan tunduk dan patuh terhadap Presiden Soekarno. Berbagai artikel yang berisi ajakan untuk menghancurkan Manifes Kebudayaan serta meritul para penandatanganinya mewarnai media massa di Indonesia, khususnya media massa yang dikuasai Lekra dan kawan-kawannya. Pelarangan Manifes Kebudayaan tersebut tampaknya menjadi sebuah amunisi baru bagi Lekra untuk menghancurkan para penanda tangan dan pendukung Manifes Kebudayaan.

Berita mengenai Manifes Kebudayaan mewarnai berbagai media massa, seperti di *Bintang Timur*, *Harian Rakyat*, *Warta Bhakti*, dan *Suluh Indonesia*. Lekra dan para pendukungnya tampaknya semakin gencar memuat artikel-artikel yang berisi "pengganyangan" terhadap para manifestan. Pernyataan pelarangan Presiden Soekarno digunakan mereka sebagai dasar dalam melakukan hal tersebut. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari artikel yang berjudul "Hakekat Manikebu" yang dimuat di *Warta Bhakti* berikut ini

Oleh karena itu, djika sudah djelas bahwa "Manikebu" merupakan bahaja bagi penjelenggaraan revolusi kita, runtuhannya ini harus dihantjurkan sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin lagi dengan reruntuhanja itu dibangun rumah baru bagaimanapun djuga sederhananja rumah itu. Dalam hal ini pertama2 peratjunan generasi muda kita dengan faham Manikebuisme harus ditjegah.

Adalah wajar bahwa larangan Presiden terhadap “Manikebu” harus mempunyai follow-up dengan menghanturkan Manikebuisme disemua bidang operasinya selama ini.⁶

Dari artikel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan Presiden Soekarno tentang pelarangan Manifes Kebudayaan dijadikan Lekra dan kawan-kawannya sebagai sebuah pelegitimasi untuk menghancurkan Manifes Kebudayaan. Bahkan pernyataan pelarangan tersebut dijadikan mereka sebagai sebuah langkah awal untuk melakukan aksi penghancuran Manifes Kebudayaan yang lebih ofensif. Penghancuran tersebut bukanlah hanya penghancuran Manifes Kebudayaan, melainkan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dekat dengannya, seperti para penandatangan serta organisasi-organisasi pendukungnya.

Hal ini senada dengan pernyataan Sitor Situmorang yang dimuat di *Bintang Timur*. Sitor Situmorang yang merupakan ketua LKN tersebut menyatakan bahwa ia menghendaki “pengganyangan” terhadap organisasi-organisasi ataupun orang-orang yang mendukung Manifes Kebudayaan. Penghancuran terhadap badan-badan ataupun para pendukung Manifes Kebudayaan dianggapnya sebagai sebuah aksi yang revolusioner. Oleh karena itu, ia terus mengimbau semua orang yang berperan terhadap revolusi untuk terus melakukan serangan terhadap Manifes Kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Djelas, kata Sitor, bahwa larangan terhadap “Manikebu adalah aksi revolusioner sebagai puntjak dari aksi² organisasi massa yang mengganjang “Manikebu”. Larangan itu adalah tjanang buat retooling yang Manipolis terhadap aparaturnya revolusi, chususnya dibidang kebudayaan. Pengganjangan djalan terus dan sasarannjapun djelas, terutama terhadap badan² dan tokoh² yang bertanggungjawab atas Manikebu.⁷

⁶ “Hakekat Manikebu,” *Warta Bhakti*, 11 Mei, 1964.

⁷ “Larangan thd ‘Manikebu’ Tjanang Rituling thd Aparatur Revolusi,” *Bintang Timur*, 15 Juni, 1968.

Tampaknya, propaganda yang dilakukan Lekra dan kawan-kawannya lewat media massa tersebut berhasil. Masyarakat dan berbagai organisasi pun akhirnya terprovokasi untuk ikut melakukan serangan terhadap Manifes Kebudayaan. Mereka menyerang para penanda tangan Manifes Kebudayaan dan organisasi yang mendukungnya. Penyerangannya tidak hanya melalui harian maupun majalah, tetapi juga melalui spanduk dan poster-poster besar yang diletakkan di pinggir jalan maupun diletakkan ketika ada sebuah acara. Hal ini seperti yang diberitakan di *Bintang Timur* dengan artikelnya yang berjudul "Manikebu Diganjang sampai di Kampung²".

Manikebu ternyata tidak saja diganjang melalui media pers, tapi sudah sampai ke kampung-kampung. Demikian dikatakan oleh seorang pelapor BT. Hal ini terbukti di sebuah kampung di daerah Ps. Minggu, dimana selain terdapat posternya pada sebuah panggung terbuka yang didirikan untuk dipergunakan bagi kesenian Rakjat dalam rangka memperingati ulangtahun kota Djakarta yang ke 437, selain terdapat poster yang menggambarkan tjita² membentuk masyarakat adil dan makmur dan semangat perjuangan para sukarelawan, telah pula dilontarkan seruan² dengan huruf² gadjah: Ganjang Malaysia kolonialis dan neo-kolonialis! Hantjurkan kebudajaan imperialis! dan "Hantjurkan Manikebu!"⁸

Pelarangan Manifes Kebudayaan ditambah dengan penciptaan suasana yang memojokkan Manifes Kebudayaan yang dilakukan Lekra dan kawan-kawannya tentunya berpengaruh terhadap nasib pribadi para manifestan. Cap manikebuis yang dilekatkan Lekra dan kaum-kaumnya kepada mereka membuat seolah mereka merupakan penjahat revolusi. Oleh karena itu, para manifestan dianggap membahayakan dan harus dihancurkan.

Sebagai pihak yang dianggap membahayakan revolusi, beberapa penanda tangan naskah Manifes Kebudayaan pun digeser dari pekerjaannya. H. B. Jassin akhirnya harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Hal ini dilakukannya karena ia tidak ingin menempatkan pimpinan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan pimpinan Lembaga Bahasa dan Kebudayaan dalam kesulitan akibat keberadaan dirinya.

⁸ "Manikebu Diganjang sampai di Kampung²," *Bintang Timur*, 5 Juli, 1964, hlm. 1.

Boen S. Oemarjati yang juga menjadi pengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pun ikut mengundurkan diri dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Pada masa itu memang terjadi konflik di dalam Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Suasana yang ada membuat jurusan tersebut terbelah menjadi dua kubu, yaitu manipolis dan manikebuis. Beberapa dosen yang dianggap manikebuis antara lain Akhadiati Ikram, Nugroho Notosusanto, J. U. Nasution, M. Saleh Saad, B. Suhardi, Djoko Kentjono, Lukman Ali, Harimurti Kridalaksana, dan Muhadjir.⁹ Cukup banyaknya dosen yang dianggap manikebuis ini membuat Fakultas Sastra Universitas Indonesia mendapat predikat sebagai sarang kaum Manifes Kebudayaan.

Bukan hanya itu saja, cap manikebuis yang dipandang sebagai penjahat revolusi pada masa itu membuat beberapa mahasiswa menolak diuji oleh dosen-dosen manikebuis. Mahasiswa tersebut yaitu Hidayat dan Piet. Mereka tidak ingin diuji oleh dosen tersebut karena mereka berpendapat bahwa keserjanaan mereka adalah revolusi dan rakyat.¹⁰ Dengan alasan tersebut dapat dilihat bahwa mereka juga beranggapan bahwa manifestan kontrarevolusi dan tidak memihak kepada rakyat.

Selain H. B. Jassin, tokoh lain yang juga digeser dari jabatannya karena ikut menandatangani naskah Manifes Kebudayaan adalah Wiratmo Soekito. Ia yang pada masa itu bekerja di RRI, digeser jabatannya. Pada masa itu, Taufiq Ismail juga harus memupuskan harapannya untuk sekolah ke Amerika Serikat karena diberitakan bahwa CGMI mengajukan tuntutan kepada Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor untuk memberhentikan Taufiq Ismail dan membatalkan keberangkatannya untuk belajar ke Amerika Serikat. Salah satu delegasi CGMI menjelaskan alasan dilakukannya tindakan tersebut kepada Taufiq Ismail karena ia merupakan tokoh Manifes Kebudayaan.

Tampaknya tidak hanya pribadi para pendukung Manifes Kebudayaan yang coba diserang, karya-karya mereka pun tidak luput dari serangan mereka. Hal ini terlihat dari aksi Soepardo S. H., yang pada waktu itu menjabat sebagai pembantu Menteri P&K. Soepardo tampaknya berhasil dipengaruhi Lekra sehingga mengeluarkan instruksi gelap yang berisi pelarangan penggunaan buku-

⁹ Lukman Ali, "Prahara Budaya, 31 Tahun Lalu," *Media Indonesia*, 25 Juni, 1995.

¹⁰ "Tetap Menolak Diuji oleh Manifes Kebudayaan," *Bintang Timur*, 5 Juni, 1964, hlm. 1.

buku karangan orang-orang Manifes Kebudayaan. Instruksi ini ditujukan kepada lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Menteri P&K. Hal ini senada dengan pernyataan Bokor Hutasuhut bahwa Soepardo digunakan Lekra untuk melakukan aksi pelarangan terhadap karya-karya para manifestan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Teror ini dilandjutkan lagi dengan menggunakan Soepardo SH jang pada waktu itu menduduki tugas sebagai Pembantu Menteri PDK, dengan mengeluarkan instruksi gelap kepada lembaga2 jang berada dibawah naungan PDK, jang melarang penggunaan2 buku2 karangan orang2 manikebu-is. Setiap jang memberi instruksi gelap ini tentunja akan mereka tendang. Papol dan ormas2 antek PKI serta tjetjunguknja melantjarkan pay-war jang tudjuannya menakut-nakuti parapenerbit dan toko2 buku agar tidak bersedia menerbitkan buku2 orang2 manikebu-is itu.¹¹

Dari kutipan di atas juga dapat terlihat bahwa Lekra dan para pendukungnya juga melakukan tekanan kepada para penerbit dan toko-toko buku agar tidak bersedia menerbitkan dan mengedarkan buku-buku para sastrawan pendukung Manifes Kebudayaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan H. B. Jassin yang mengungkapkan bahwa ketika ia ke toko-toko buku, buku karangannya sudah tidak ada. Penerbitnya menceritakan kepada H. B. Jassin bahwa pemuda rakyat ramai-ramai mendatangi toko tersebut dan mempertanyakan kenapa buku H. B. Jassin masih dijual. Oleh karena itu, penerbitnya merasa ketakutan untuk menjual buku H. B. Jassin.

Buku-buku yang dilarang pada saat itu berjumlah 92 buku. Buku-buku tersebut umumnya merupakan buku-buku yang ditulis oleh para pendukung Manifes Kebudayaan. Buku-buku tersebut di antaranya adalah buku-buku H. B. Jassin, Wiratmo Soekito, Trisno Sumardjo, Boen S. Oemarjati, Bokor Hutasuhut, Bur Rasuanto, dan M. Saribi. Tampaknya pelarangan terhadap buku-buku tersebut bukan terkait dengan isinya, melainkan dengan penulisnya yang merupakan para manifestan.

Tidak hanya itu saja, mereka juga membakar buku-buku. Hal ini salah satunya dibuktikan dari pengakuan yang dialami oleh Goenawan Mohamad. Buku-buku yang ada di rumah Goenawan Mohamad diambil oleh polisi yang

¹¹ Bokor Hutasuhut, "Perlu Mendjernihkan Soal Manifes Kebudayaan", tulisan yang terdapat di Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin, hlm. 4—5.

didampingi oleh anggota Lekra dan pemuda rakyat. Buku-buku tersebut kemudian dibakar di tepi jalan depan rumah orang tuanya di Bali.¹²

Pelarangan Manifes Kebudayaan tersebut juga membuat beberapa media massa yang dipakai sebagai sarana para manifestan "bersuara" ditutup. Salah satu media massa yang ditutup adalah majalah *Sastra* yang dipimpin oleh H. B. Jassin. Pelarangan Manifes Kebudayaan tersebut membuat para manifestan tidak lagi dapat mempublikasikan tulisannya. Berbagai media massa tampaknya merasa takut untuk memuat tulisan para manifestan. Begitu sulitnya manifestan untuk memuat karya-karyanya di media massa sehingga mereka menggunakan nama samaran ketika mengirimkan karya-karyanya. Taufiq Ismail, misalnya, yang menggunakan nama Nur Fajar sebagai nama samarannya. Bahkan Goenawan Mohamad harus meminjam nama seorang wartawan yang bernama Ed Zoelverdi agar tulisannya dapat dimuat.¹³

Pelarangan Manifes Kebudayaan tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap kehidupan kesusastraan Indonesia. Pelarangan tersebut membuat Lekra dan kawan-kawannya semakin berkuasa di bidang kesusastraan. Situasi ini membuat sebuah iklim kesusastraan yang kerontang. Kiblat sastra seakan hanya tertuju pada Lekra. Pada masa itu, karya-karya sastra diwarnai oleh karya-karya sastra yang bertemakan rakyat. Rakyat yang dimaksud dalam hal ini adalah buruh dan petani yang menjadi soko guru revolusi bagi PKI/Lekra. Keindahan dalam mencipta suatu karya sastra pun tidak lagi dipentingkan. Karya sastra yang muncul pada masa itu lebih mementingkan isi daripada keindahan. Karya-karya sastra yang membicarakan Tuhan, alam maupun cinta akan begitu sulit ditemukan pada masa itu.

Memang sejak awal tahun 1960-an, dominasi sastrawan Lekra dalam bidang kesusastraan telah terlihat. Pada masa itu, tekanan Lekra terhadap sastrawan begitu kuat. Karya sastra berkiblat ke sastra Lekra, yaitu seni yang berpihak pada rakyat. Penilaian karya sastra dilihat dari isinya, apakah karya tersebut membela kepentingan rakyat, yaitu kepentingan petani dan buruh. Oleh karena itu, pada masa itu muncul karya-karya sastra yang bertemakan rakyat.

¹² Misbach Yusa Diran, "Sekelumit Pengalaman Manifes Kebudayaan," *Horison*, September, 1993, hlm. 313.

¹³ Ed Zoelverdi, "Ketika Balai Budaya Dilempari Batu," *Horison*, Oktober, 1994, hlm. 6.

Goenawan Mohamad memberi kesaksian atas hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ada kecenderungan para penulis untuk membuat karya-karya yang berkaitan dengan tanah air dan rakyat karena pengaruh iklim kesusastraan Indonesia saat itu.¹⁴ Goenawan Mohamad juga mengakui bahwa ia juga menulis sajak yang bertemakan rakyat. Sajak tersebut berjudul “Lagu Pekerja Malam”. Hal ini dapat dilihat dari kutipan puisi berikut

....
Tangan yang hitam, tangan lelaki
Lengan melogam berpepic api
Dan batu pun retak di lagu serak
Majulah jalan, majulah setapak

Pada kutipan sajak “Pekerja Malam” di atas dapat dilihat bahwa Goenawan Mohamad mengambil tema tentang rakyat kecil pada puisinya. Tidak hanya Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail pun pada saat itu pernah menulis puisi yang berpihak pada rakyat. Puisi tersebut berjudul “Syair Orang Lapar” yang ditulis tahun 1964. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut

Lapar menyerang desaku
Kentang dipanggang kemarau
Surat orang kampungku
Kuguratkan kertas

Risau

Lapar lautan pidato
Ranah dipanggang kemarau
Ketika berduyung mengemis
Kesinikan hatimu

Kuiris

Lapar di Gunung Kidul
Mayat dipanggang kemarau
Berjajar masuk kubur
Kaulang jua

Kalau

¹⁴ Goenawan Mohamad, *Kesusastraan dan Kekuasaan*, (Jakarta, 1993), hlm. 17.

Pada puisi yang berjudul “Sajak Orang Lapar” tersebut dapat terlihat bahwa Taufiq Ismail juga menciptakan puisi yang bertemakan rakyat kecil. Dalam puisi di atas terlihat kepedulian Taufiq Ismail terhadap rakyat kecil yaitu dengan cara menggambarkan peristiwa kelaparan yang dialami rakyat. Puisi di atas memperlihatkan bahwa Taufiq Ismail sebagai seorang manifestan juga menulis puisi bertemakan rakyat.

Begitu juga yang terjadi pada penyair Hartojo Andangdjaja. Ia juga menuliskan puisi bertemakan kerakyatan. Puisi tersebut berjudul “Rakyat” yang ditulis tahun 1961.

Rakyat ialah kita
 Jutaan tangan yang mengayun dalam kerja
 Di bumi tanah tercinta
 Jutaan tangan mengayun bersama
 Membuka hutan lalang jadi ladang-ladang berbunga
 Mengepulkan asap dari cerobong pabrik-pabrik di kota
 Menaikkan layar menebarjala
 Meraba kelam ditambang dan batu bara
 Rakyat ialah tangan yang bekerja¹⁵

Dari kutipan puisi Hartojo Andangdjaja di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa ia menulis puisi yang berpihak pada rakyat. Rakyat yang dibelanya adalah petani dan buruh, yang dianggap Lekra sebagai soko guru. Hal ini memperlihatkan adanya pengaruh yang besar dari kehidupan kesusatraan yang sengaja diciptakan Lekra.

Walaupun berbicara tentang rakyat, tetapi terlihat adanya perbedaan antara cara penulisan Hartojo Andangdjaja dengan penulis Lekra. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan karya Hartojo tersebut dengan penulis Lekra, Sobron Aidit. Sobron Aidit juga mengangkat tema rakyat dalam puisinya yang berjudul “Kami Rakjat” (1959). Hal ini dapat dilihat dari puisinya berikut

Kami Rakjat

Dulu kukira akulah orangnja
 hidup ini duka dan derita

¹⁵ M. Saribi Afn (ed.), *Manifestasi* (Jakarta, 1963), hlm. 29.

satu-satunja didunia dan asing
begitulah aku sedihnja sendiri.

Malampun hanja mengulang menghitung sedu sedan
untuk besoknja jang kemudian terantjam
oleh dahaga lapar dan hina
bila gerangan berachir—, begitu selalu aku berpikir.

Kini berdjuta kawan hina dan lapar
tidak berbadju tjelanapun bertambal
djanganlah sebut rumah—, tapi insaf dan sadar
dalam satu hati besar kami berkumpul.

Dalam hati dan pusat djantung ada garis
satunja kehendak, tapi djuga satunja nasib
teriknja tali mengikat haramkan putus
kami, ja, kami orangnja bukan lagi ikatan sedih.

Bukan pula tidak bisa dan tidak kuasa
hanjalah perhitungan akal dan perasaan
itupun akan tiba waktunja
api merah ditiap keluarga.

Akan tiba waktunja
bendera merah megah
tanda darah, terpantjang ditiap rumah
keluarga kami orang hina dan lapar.¹⁶

Puisi Sobron Aidit di atas juga membicarakan rakyat. Namun, ada nada keberpihakan penulis terhadap pihak tertentu, yang dalam hal ini adalah PKI. Keberpihakan ini ditunjukkan pada bait terakhir. Pada bait terakhir Sobron Aidit mengungkapkan bahwa suatu hari nanti, PKI akan menang. Hal ini tersirat dari baris puisi yang berbunyi “akan tiba waktunya/ bendera merah megah”. Bendera merah megah ini penulis interpretasikan sebagai PKI karena simbol PKI adalah warna merah, sesuai dengan warna bendera partainya. Hal ini membuktikan bahwa puisi tersebut digunakan sebagai alat propaganda politik. Hal ini jelas berbeda dengan karya Hartojo Andangdjaja yang dalam menulis puisinya tentang rakyat tidak mempunyai pretensi apa-apa.

Pada masa pascapelarangan Manifes kebudayaan, kehidupan kesusastraan Indonesia juga sempat dihebohkan dengan peristiwa penolakan hadiah oleh

¹⁶ Sobron Aidit, *Pulang Bertempur*, (Jakarta, 1959), hlm. 4—5.

beberapa pengarang terhadap hadiah Yayasan Yamin. Peristiwa tersebut terjadi pada 23 Desember 1964. Pada waktu itu, Yayasan Yamin yang diketuai oleh Ketua MPRS-WPM III Menteri Pembangunan, Chairul Saleh, mengumumkan pemenang hadiah sastra Yamin. Yayasan Yamin memberikan hadiah terhadap karya-karya sastra terbaik. Pemenang pertama adalah Toha Mohtar dengan novelnya *Daerah Tak Bertuan*. Pramoedya Ananta Toer dengan novelnya *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* menerima hadiah kedua. Novel Trisnojuwono berjudul *Pagar Kawat Berduri* mendapat juara ketiga. Sementara itu, Bur Rasuanto dengan kumpulan cerpennya *Mereka akan Bangkit* mendapat hadiah keempat.

Namun, hadiah Sastra Yamin ini akhirnya menimbulkan kehebohan karena beberapa pengarang menolaknya, termasuk Pramoedya Ananta Toer yang alasan penolakannya telah dikemukakan melalui harian *Bintang Timur* dan *Antara*. Ia menolak hadiah tersebut karena Bur Rasuanto, yang merupakan penanda tangan Manifes Kebudayaan mendapat juara keempat. Sementara itu, Toha Mohtar yang novelnya *Daerah Tak Bertuan* telah dipilih untuk mendapat hadiah pertama mengirim surat kepada Yayasan Yamin untuk minta penjelasan dasar politik penilaian karya-karya tersebut sehingga tidak terdapat garis pemisah yang jelas antara pengarang-pengarang manikebuis dan pengarang manipolis.

Jika melihat cerpen-cerpen Bur Rasuanto dalam kumpulannya *Mereka akan Bangkit*, tema yang diambil juga seputar masalah kehidupan rakyat, seperti kehidupan buruh. Kumpulan cerpen Bur Rasuanto tersebut memang tampaknya layak untuk diberikan penghargaan. Pernyataan penolakan yang dikemukakan oleh Pramoedya Ananta Toer dengan alasan karena Bur Rasuanto adalah penanda tangan Manifes Kebudayaan tentunya kurang bertanggung jawab. Kehidupan kesusastraan Indonesia tampaknya menjadi kurang sehat karena dasar penilaian suatu karya sastra bukan dilihat dari bobot karya sastra itu sendiri, melainkan dari pengarangnya. Hal ini jelas menjadi subjektif dan berdampak tidak baik terhadap kesusastraan Indonesia.

Manifes Kebudayaan sebagai sebuah perjuangan yang menuntut kebebasan berkreasi dalam kesenian dan kesusastraan memang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kehidupan kesusastraan Indonesia. Pernyataan

mereka sebagai reaksi atas sikap Lekra melahirkan suatu perdebatan ideologi di dunia kesusastraan. Perdebatan ini memang melahirkan dua kubu dalam sastra Indonesia. Perdebatan antara dua kubu yang berbeda ideologi ini memang bukan hal pertama dalam kesusastraan Indonesia. Namun, tampaknya masalah tersebutlah yang berulang kali kembali disinggung ketika terjadi perdebatan dalam kehidupan kesusastraan Indonesia.

Salah satunya dapat dilihat ketika terjadi perdebatan sastra kontekstual di dalam kesusastraan Indonesia. Perdebatan sastra kontekstual ini terjadi pada tahun 1984 yang dipopulerkan oleh Ariel Heryanto. Sebenarnya konsep sastra kontekstual pertama kali dikenalkan oleh Arief Budiman. Pembicaraan mengenai sastra kontekstual ini membawa Manifes Kebudayaan kembali untuk disinggung karena sastra kontekstual dianggap sebagai sebuah perlawanan terhadap sastra universal yang dianut oleh Manifes Kebudayaan.

Pembicaraan mengenai masalah Manifes Kebudayaan ini juga kembali muncul ketika Dewan Kesenian Jakarta mengadakan seminar 25 tahun Manifes Kebudayaan pada 15 dan 16 Oktober 1988 di Taman Ismail Marzuki.¹⁷ Seminar tersebut membicarakan peristiwa-peristiwa politik di sekitar kelahiran Manifes Kebudayaan serta gagasan tentang perlunya gerakan budaya untuk mentransformasikan pernyataan Manifes Kebudayaan.

Pada tahun 1995, masalah Manifes Kebudayaan pun kembali diangkat berkaitan dengan munculnya buku *Prahara Budaya*. Taufiq Ismail dan Moeljanto merupakan editor buku tersebut. Buku ini menampilkan artikel-artikel yang berhubungan dengan Manifes Kebudayaan dan penyerangan yang dilakukan oleh Lekra.

Tahun 2007, masalah Manifes Kebudayaan kembali ramai. Perbincangan mengenai perdebatan antara Manifes Kebudayaan dan Lekra terjadi kembali. Namun perbincangan mengenai Manifes Kebudayaan tersebut terjadi di dunia maya. Perbincangan tersebut melibatkan sastrawan besar, yaitu Goenawan Mohamad dan Saut Sitomorang.

Perdebatan yang paling mutakhir mengenai masalah Manifes Kebudayaan yaitu berlangsung di Teater Utan Kayu pada 18 Februari 2009. Teater Utan Kayu

¹⁷ "Seminar 25 Tahun Manifes Kebudayaan: Menolak Kebudayaan Berada di Bawah Subordinasi Politik", dalam *Kompas*, 17 Oktober 1988, hlm. 15.

mengadakan sebuah dialog Manifes Kebudayaan dan Lekra. Taufiq Ismail dan J. J. Kusni menjadi pembicara dalam dialog tersebut. Sementara itu, Ikranegara menjadi moderator. Dalam dialog yang dihadiri beberapa manifestan dan anggota Lekra tersebut, Taufiq Ismail menginginkan adanya sebuah perdamaian total dan rekonsiliasi kembali masalah tersebut. Namun tampaknya dialog tersebut tidak menemui akhir kesepakatan untuk melaksanakan perdamaian total. Bahkan dialog tersebut pada akhirnya menambah jarak di antara keduanya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keduanya masih tidak dapat berdamai dengan masa lalunya. Padahal seharusnya masalah tersebut dapat dilihat dengan cara menjadikan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelajaran agar tidak terjadi di kemudian hari.

